

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama pemerintahan Orde Baru, TNI dan Polri yang menyatu dalam ABRI, telah terjadi dominasi militer pada hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer juga difungsikan sebagai pilar penyangga kekuasaan. Konsep ini muncul sebagai dampak dari implementasi konsep dwifungsi ABRI yang telah menjelma menjadi multifungsi. Akibatnya peran ABRI dalam kehidupan bangsa telah melampaui batas-batas konvensional keberadaannya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan. Integrasi status Polri yang berwatak sipil ke dalam tubuh ABRI dapat dikatakan sebagai pengingkaran terhadap prinsip demokrasi.

Penguatan ABRI sebagai kekuatan sosial politik baru terjadi secara legal formal setelah keluarnya UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Lahirnya UU ini untuk lebih memantapkan landasan hukum dwifungsi ABRI, yang sebelumnya hanya diatur dalam Ketetapan MPR.

Dalam UU No. 20 Tahun 1982 ditegaskan bahwa pengaturan peran sosial politik ABRI adalah sebagai kekuatan sosial yang bertindak selaku dinamisator dan stabilisator. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah *contradiction in terminis*, karena bagaimana mungkin dinamisator dan stabilisator sekaligus dipegang oleh orang yang sama. Setidak-tidaknya ada dua pasal yang mendukungnya. Pasal 26 menyebutkan, Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan

pertahanan keamanan dan sebagai fungsi kekuatan sosial. Pasal 28 ayat (1) menegaskan, Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggungjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

Sementara itu dalam ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan fungsi sosial, Angkatan Bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkuat ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, serta mengembangkan Demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan legalitas ini maka ABRI tampil sebagai kekuatan yang mendominasi pemerintahan Orde Baru. *Day-to-day politics* menyebabkan keterlibatan ABRI di bidang sosial politik lebih menonjol ketimbang perannya sebagai alat Negara di bidang pertahanan dan keamanan negara. Atas nama stabilitas dan pengamanan terhadap Pancasila dan UUD 1945, ABRI telah mendominasi hampir semua relung kehidupan bernegara yang bersifat non-militer, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Di lapangan politik, lembaga legislatif yang identik dengan pemilihan umum, pada masa Orde Baru, Pemilu pertama digelar pada 1971. TNI dan Polri (ABRI) tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi ABRI diberi kompensasi jatah satu fraksi di DPR/MPR (100 orang) dan DPRD. Pengkaplingan jabatan-jabatan sipil oleh ABRI ini sangat mempersempit ruang gerak sipil untuk berperan pada

jabatan-jabatan yang merupakan domainnya. Dengan demikian, keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara banyak yang lahir dari tangan militer.

Keterlibatan ABRI dalam dunia politik di era Orde Baru merupakan implementasi dari pelaksanaan dwifungsi ABRI. Artinya, selain fungsi pertahanan dan keamanan, TNI juga memainkan fungsi sosial politik. Di samping itu, ABRI juga bermain di jabatan pemerintahan pusat hingga di daerah, bahkan menjadi anggota kabinet.

Jatuhnya Soeharto telah melahirkan satu perubahan besar dalam sistem perpolitikan Indonesia secara umum. Secara khusus, dalam perspektif hubungan sipil-militer, telah terjadi titik balik yang ditandai dengan kritik-kritik tajam atau bahkan hujatan terhadap militer sepanjang Soeharto berkuasa. Tuntutan terhadap reformasi peran militer pun muncul dari berbagai komponen masyarakat, termasuk dari kalangan militer sendiri. Penghapusan dwi fungsi ABRI juga menjadi salah satu pilar reformasi yang diajukan komponen gerakan reformasi, terutama kalangan mahasiswa.

Pada awal masa reformasi itu pula lah, ABRI dikecam dan dicaci oleh rakyat, terutama mahasiswa, karena perannya sebagai alat kekuasaan yang otokratis pada masa Orde Baru. ABRI dianggap paling bersalah terhadap krisis yang dihadapi bangsa Indonesia. Namun, ABRI tetap tegar dan secara berlanjut ikut mengambil bagian dalam upaya mengatasi krisis, khususnya mencegah disintegrasi bangsa dan mengawal reformasi nasional.

Secara mendasar, gerakan reformasi harus diinterpretasikan sebagai suatu upaya yang terorganisir dan sistematis dari bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi, yang disepanjang kekuasaan rezim Orde Baru terlanjur telah dimanipulasi dan diselewengkan. Berdasarkan interpretasi reformasi tersebut, maka agenda nasional harus difokuskan pada upaya pengembangan yang terus menerus terhadap ‘indeks demokrasi’ (*indices of democracy*).

Indeks itu dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek kehidupan berbangsa dan bernegara: *Pertama*, keberadaan sistem pemilihan umum yang bebas dan adil; *kedua*, keberadaan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; *ketiga*, pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik seluruh warga tanpa kecuali; dan *keempat*, keberadaan masyarakat yang memiliki rasa percaya diri yang penuh.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), merupakan agenda penting bagi setiap elemen masyarakat, dikarenakan pesta demokrasi bagi penerus pimpinan daerahnya akan ditentukan pada momentum tersebut. Khususnya institusi partai politik harus selektif dalam memilih calon perwakilan yang akan diusungnya untuk maju ke pemilukada. Komunitas atau organisasi masyarakat akan terlihat pada kampanye-kampanye sebagai anggota relawan untuk mengusung calon yang diinginkan.

Setidaknya hingga 12 Januari 2017, terdapat 569 pasangan calon yang sudah terdaftar dengan status diterima dalam laman situs Pilkada 2018. Empat pasangan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 1.138 orang calon

itu, 16 orang di antaranya dari unsur TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah berstatus purnawirawan.

Lokadata *Beritagar.id* mengolah data calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2018, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Data yang digunakan dari laman KPU tersebut, mengabaikan calon tambahan yang masa pendaftarannya diperpanjang di 13 wilayah pemilihan karena calonnya hanya satu pasangan.

Untuk pemilihan Gubernur di 17 provinsi, dari 57 pasangan calon sebagian besar berlatar belakang eksekutif dan legislatif. Calon Gubernur dari kalangan eksekutif sebanyak 29 orang, atau satu dari dua calon Gubernur yang mendaftar. Sedangkan wakilnya yang berasal dari kalangan eksekutif mencapai 32 persen, atau 18 orang.

Kalangan eksekutif dimaksud, adalah calon yang statusnya petahana, pejabat kantor Gubernur. Sedangkan legislatif bisa anggota DPR, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Untuk calon Gubernur dari kalangan swasta, jumlahnya mencapai 30,4 persen atau 17 orang. Sedangkan calon wakil Gubernur dari kalangan ini, berjumlah 18 orang.

Dalam pemilihan bupati, jumlah pasangan calon dari kalangan swasta justru paling banyak. Dari 376 pasangan calon, sebanyak 114 calon Bupati dan 190 calon wakil Bupati dari kalangan swasta.

Calon dari kalangan swasta juga marak dalam calon pemilihan wali kota. Sebanyak 62 orang calon wali kota dan 84 orang wakilnya, berasal dari kalangan swasta.

Patut dicatat, kategori swasta tidak serta merta calon tersebut adalah pengusaha. Dalam beberapa kasus, kader partai yang dicalonkan mencantumkan "swasta" sebagai pekerjaan resminya. Setidaknya, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik).

Pada tahun 27 Juni 2018 akan diadakan pemilukada serentak di Indonesia. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti pesta demokrasi antara lain 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Provinsi tersebut antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Maluku Utara (Prasetia, 2017).

Untuk mensukseskan pilkada serentak tersebut, ada beberapa catatan atau poin-poin penting. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com 26 Desember 2017, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) supaya sukses menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Pertama, terkait dengan kapasitas dan kompetensi petugas penyelenggara di lapangan, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kedua, soal hak pilih warga. Titi menuturkan, KPU RI semestinya bisa

mengantisipasi secara optimal karut-marut perekaman kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).Ketiga, soal potensi konflik dan benturan antarpol dan pendukung di Papua. Titi menuturkan, agar potensi konflik bisa diminimalisasi, maka harus ada upaya pencegahan dan antisipasi sejak awal (Suryowati, 2017).

Pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah diikuti oleh kandidat dari berbagai macam partai pengusung dan dari berbagai latar belakang kandidat yang beragam. Mulai dari latar belakang pegawai negeri sipil (PNS), TNI-POLRI, partai politik, pengusaha, dan lain-lain. Calon pemimpin daerah dari ranah pemerintahan ataupun pengusaha dan partai politik sudah biasa, namun dalam waktu 3 periode terakhir sudah menjadi tren dari lingkungan militer baik mantan anggota ataupun aktif mengikuti pemilihan kepala negara atau daerah. Contohnya saja, Pada zaman orde baru, Mantan Presiden Soeharto atau Jendral bintang 5 ini juga mengikuti pesta demokrasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wiranto merupakan mantan panglima besar TNI yang mengikuti pemilu presiden 2004 dan pada masa ini SBY terpilih sebagai presiden selama 2 periode.

Pada tahun 2017-2018 juga timbul fenomena unik di Indonesia. Banyak para pejabat tinggi di TNI-POLRI mengikuti pemilihan langsung kepala daerah, contohnya adalah anak dari SBY yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang mengikuti pilkada DKI Jakarta untuk naik menjadi Gubernur. Senada dengan hal tersebut, dilansir dari Kompas.com edisi 8 Januari 2018 menjabarkan; Selama ini, seolah hanya angka yang dipublikasikan. Bahwa Pilkada 2018 yang hari puncaknya alias hari pemungutan suara jatuh pada Rabu, 27 Juni 2018, diikuti

oleh 171 Daerah di Indonesia. Pilkada 2018 ini memang berbeda. Belum pencalonan, sudah ada setidaknya 5 Jenderal aktif yang menjadi nonaktif. Mereka mengajukan pensiun dini, meski kariernya masih mulus, dan memiliki waktu dua tahun menjelang pensiun. Ada pula pemegang komando tertinggi pasukan elit Polri, yang juga memiliki kecemerlangan karier yang sama (Witjaksono, 2018).

Lalu dari tempo.co edisi 26 Desember 2017 mengungkapkan; setidaknya ada lima jenderal dari TNI dan Polri yang akan maju dalam pilkada 2018. Berikut adalah nama-nama anggota TNI-Polri yang mengikuti pemilukada serentak, yakni:

1. Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara;
2. Inspektur Jendral Polisi Safaruddin digadang-gadang akan maju di Pilkada Kaltim 2018 lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan di kabarkan akan diusung oleh PDIP untuk memenangkan suara di Jawa Barat;
4. Inspektur Jenderal Murad Ismail diusung oleh Partai Nasdem dan PDIP untuk maju di Pilkada Maluku 2018;
5. Inspektur Jenderal Paulus Waterpauwakan maju dalam pemilihan calon Gubernur Papua diusung oleh Partai Golongan Karya (Chairunnisa, 2017).

Fenomena tersebut adalah suasana unik dari ranah politik yang kita rasakan saat ini. Kesempatan yang sama untuk calon kepala daerah dari latar belakang yang berbeda terbuka lebar. Menjadikan iklim politik nasional menjadi

isu yang “panas” sebagai bahan perbincangan di semua kalangan, terutama di media massa cetak maupun elektronik. Pemberitaan ini dimulai dari awalnya pemilu pada 2017 dan kemungkinan akan habis setelah masing-masing kandidat terpilih sebagai kepala daerah di wilayah kerja masing-masing.

Melihat sejarah kepemimpinan dari alumni TNI dalam memimpin negara atau daerah ada prestasi baik dan buruk. Namun, pendapat atau persepsi dari masyarakat justru berbeda-beda. Masyarakat yang heterogen, maka akan bervariasi pula persepsi yang timbul. Sedangkan persepsi sendiri tidak tampak mata, dikarenakan berupa pemikiran individual dan tersimpan pada memori masing-masing.

Ada beberapa alasan yang bisa digunakan militer untuk dapat kembali masuk ke ranah politik, diantaranya adalah karena militer menilai sipil telah gagal mengatasi negara. Ada persepsi dari militer bahwa sipil gagal. Kemudian juga sipil telah dinilai menabrak konstitusi. Kalau dua faktor ini ada, ada alasan militer masuk ke ranah politik praktis. Faktor lain yang tidak kalah penting, yakni militer akan masuk ke politik kalau sipil sudah mengganggu atau mengintervensi TNI. Seperti mengintervensi pengadaan alutsista, intervensi pergantian jabatan tinggi TNI dan lain-lain,” tambah dosen Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia ini.

Menurut Andi, jumlah purnawirawan TNI yang memegang jabatan publik sangat kecil. TNI sendiri sudah sadar hal tersebut. Sebab, rotasi yang cepat menjadikan TNI tidak memiliki kekuatan untuk menguasai politik daerah. PR kita untuk menjaga trend positif tersebut. “Di negara demokratis, alasan TNI masuk

politik karena sipil dipersepsikan gagal dalam mengurus pemerintahan (sipil) menabrak konstitusi. Sementara, TNI dapat masuk ke ranah politik ketika kegagalan tersebut memberikan dampak negatif pada TNI. Apakah persepsi kegagalan sipil tersebut muncul saat ini,” ujar PhD lulusan Singapura ini (www.centerofrisk-sia.com/andi-widjajanto-ada-banyak-faktor-tni-masuk-politik-praktis/).

Sejak kelahirannya, sebagai alat negara di bidang pertahanan TNI telah mengalami perubahan-perubahan tertentu seiring perubahan di dalam masyarakat Indonesia. Perubahan besar akibat pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke pemerintahan era Reformasi, seiring dengan perubahan tata nilai di tingkat global, turut memengaruhi pergeseran peran TNI dari tentara Pretoria, yakni tentara yang turut terlibat dan melakukan intervensi dalam kehidupan politik, ke arah tentara profesional. Kendati demikian, hingga saat ini berbagai kalangan masih memperdebatkan hakikat profesionalisme TNI. Keberadaan Komando Teritorial (Koter), persoalan bisnis militer, dan hubungan struktural TNI–Departemen Pertahanan (Dephan) menjadi isu yang cukup menonjol. Dalam kondisi masyarakat kita yang sampai saat ini masih berupaya mewujudkan cita-cita reformasi sekaligus bangkit dari keterpurukan di berbagai bidang akibat krisis multidimensional pada akhir dasawarsa 1990-an, diundangkannya jati diri TNI menuai berbagai pandangan mengenai upaya pembangunan TNI menuju militer profesional.

Terlihat secara gambaran umum ada persepsi negatif dan positif. Penelitian ini mengangkat dua tipe persepsi negatif atau positif. Maka persepsi

dari berbagai orang dalam menginterpretasikan pesan yang diterimanya berbeda-beda sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Begitu juga masyarakat di Indonesia dalam mempersepsikan sebuah fenomena atau isu yang sedang tren, khususnya di kota Medan.

Kota Medan merupakan ibukota dari Sumatera Utara yang termasuk sorotan rubrik nasional dikarenakan kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan memiliki masyarakat yang sangat heterogen. Dapat anda temukan berbagai macam suku yang berdomisili seperti Batak dan Melayu Deli merupakan suku asli, sedangkan pendatang seperti Minang, Aceh, Jawa, Papua, Tionghoa, India, dan lain sebagainya tumbuh dan bersoasilisasi. Selain multietnik, kota medan juga dikenal sebagai miniatur Indonesia. Kota Medan juga terkenal dengan kuliner dan objek wisata yang tersebar disekitarnya (Dimedan.co, 2016). Tokoh-tokoh terkenal yang lahir dari kota multietnis ini diidentivikasi juga banyak, seperti Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah (Agamawan, Sastrawan, Pengelola Majalah Panjimas Medan, Ketua MUI Pusat), Harun Nasution (ulama dan rektor UIN), Frederich Silaban (arsitek perancang Mesjid Istiqlal), Parlindoengan Loebis (aktivis Perhimpunan Indonesia), Ratna Sarumpaet (aktivis perempuan dan aktris), dan lain sebagainya (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_tokoh_Sumatera_Utara). Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis yakni **“Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan Tentang Calon Gubernur Berlatar Belakang Dari TNI Pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kota Medan tentang calon Gubernur dari TNI pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi tokoh masyarakat Kota Medan terhadap calon Gubernur berlatar belakang dari TNI pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini terdiri atas tiga aspek sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah uraian-uraian yang bersifat teoritis khususnya tentang persepsi tokoh masyarakat Kota Medan tentang calon Gubernur berlatar belakang dari TNI pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

b. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang ilmu komunikasi politik khususnya tentang persepsi tokoh masyarakat Kota Medan tentang calon Gubernur berlatar belakang dari TNI pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada calon-calon Kepala daerah berlatar belakang dari kalangan TNI untuk mulai mempersiapkan diri sehingga persepsi yang terbentuk di masyarakat bisa lebih baik.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik

a. Komunikasi

Pengertian komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol (Nimmo Dan, 2005: 6).

Menurut Lasswell digambarkan sebagai “*Who says what to whom in what channel with what effect*” yang berarti siapa mengatakan apa pada siapa menggunakan saluran apa dengan efek apa. Sedangkan menurut Chaffe “*Who gets to say what to whom?*” yang berarti siapa yang memperoleh hak untuk berkata apa pada siapa.

Bergantung pada titik pandangnya, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta. Singkatnya, suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang lain; atau pengalihan

informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol (Nimmo Dan, 2005: 5).

Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol (Nimmo Dan, 2005: 6).

Akhirnya, arti utama proses yang mendasari definisi kita tentang komunikasi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Proses adalah arus, perubahan, dan ketidaktetapan dalam hubungan kegiatan terhadap satu sama lain. Dalam mendalilkan apa saja komunikasi itu, Barlund melukiskan sifat proses itu sendiri—berkembang, dinamis, sinambung, sirkular, tak dapat diulang, tak dapat dibalikkan, dan kompleks. Sebagai proses, komunikasi tidak memiliki titik bertolak, tiada hentinya, ia meliputi interpretasi personal, pertukaran sosial, dan politik. Ia tidak memiliki penyebab yang mudah dilihat bagi akibatnya yang dapat diamati (Nimmo Dan, 2005: 7).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan satu orang atau suatu kelompok kepada yang lain untuk menyusun makna. Makna yang disusun merupakan citra mereka dan untuk bertukar citra itu terutama melalui simbol-simbol.

b. Pengertian Politik

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Nimmo Dan, 2005: 8).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih.

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis.

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan umum yang menyangkut pengaturan

dan alokasi sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*) (Budiardjo Miriam : 1982).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri. Dalam melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang dipakai untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

c. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai proses dengan mana pemimpin, media, dan warganegara suatu bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Dalam definisi ini, Perloff menjadi media sebagai pihak yang ikut melakukan komunikasi politik (Phillip Althoff : 1998).

Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat selanjutnya juga

melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa.

Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24).

Komunikasi politik adalah proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Beberapa unsur yang terkandung dalam definisi tersebut; Pertama, Komunikasi politik sebagai suatu proses.

Komunikasi politik tidak dapat terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan kompleks dan dinamis. Selain itu, proses tersebut juga mengandung adanya tarik menarik pengaruh. Pemerintah mempengaruhi media dengan menawarkan bahan untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian mekanisme institusional sebagai deadline dan nilai berita. Di sisi lain media juga dapat mempengaruhi masyarakat, namun masyarakat juga dapat membentuk agenda media. Kedua, pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang berhubungan dengan kebijakan publik.

Komunikasi politik dalam hal ini tidak hanya concern dengan persoalan pemilu, namun pada segenap hal yang berkaitan dengan politik (Richard M. Perloff : 1998).

Pada ranah komunikasi politik dapat diterapkan dua model komunikasi yakni, model komunikasi linear dan model komunikasi sirkuler. Model komunikasi linear adalah proses komunikasi yang pesan-pesanya melalui sebuah saluran kepada seorang penerima, yang kemudian memberikan umpan balik kepada pengirim tersebut. Sedangkan model komunikasi sirkuler adalah komunikasi itu adalah sebuah proses, berlanjut, model komunikasi linier dapat juga diistilahkan sebagai model komunikasi interaktif atau konvergen, model ini mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan suatu transaksi antar partisipan, tidak ada komunikator dan komunikan akan tetapi keduanya disebut sebagai partisipan.

Model - model tersebut adalah sebagai berikut (Qadaruddin, 2016: 2-4):

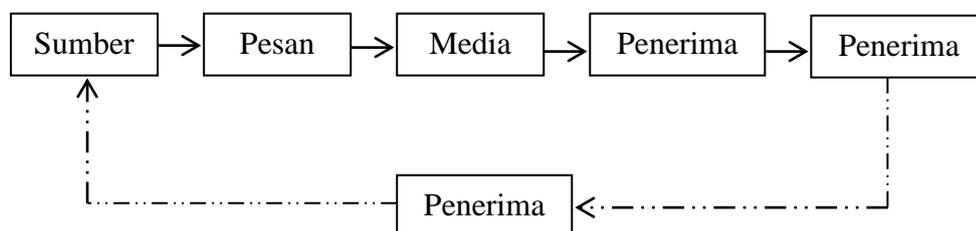


Diagram 2.1. Model Komunikasi Linier (Qadaruddin, 2016: 2-4)

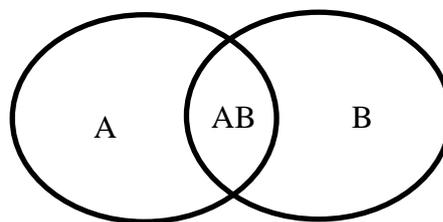


Diagram 2.2. Model Komunikasi Sirkuler (Qadaruddin, 2016: 2-4)

Gaya Komunikasi Politik Adalah seperangkat perilaku politik antarpribadi yang terspesialisasi dan digunakan dalam suatu situasi politik tertentu

baik berupa verbal maupun non verbal (Afib,2011:47-49). Komunikasi Verbal adalah sebagai berikut :

- a. *Vocabulary* (perbendaharaan kata-kata). Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi.
- b. *Racing*(kecepatan). Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat.
- c. Intonasi suara: akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam berkomunikasi.
- d. Humor. Merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi untuk memecah kekauan dalam berkomunikasi
- e. Singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti.
- f. Timing (waktu yang tepat) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan.

Sedangkan komunikasi Nonverbal mencakup aspek-aspek berupa:

- a. Komunikasi objek. Yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotipe.
- b. Sentuhan. Sentuhan dapat termasuk: bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masingmasing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif.
- c. Kronemik. Kronemik adalah penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu.
- d. Bahasa Tubuh. Meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase.
- e. Proxemik atau bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang

lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka dan perhatian Anda terhadap orang lain, selain itu juga menunjukkan simbol sosial.

- f. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan suara-suara pengisi seperti "mm", "e", "o", "um", saat berbicara juga tergolong unsur vokalik, dan dalam komunikasi yang baik hal-hal seperti ini harus dihindari.
- g. Lingkungan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Diantaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna.
- h. Variasi budaya dalam komunikasi nonverbal. Budaya asal seseorang amat menentukan bagaimana orang tersebut berkomunikasi secara nonverbal. Perbedaan ini dapat meliputi perbedaan budaya Barat-Timur, budaya konteks tinggi dan konteks rendah, bahasa, dan sebagainya. (Afib, 2011 :47-49)

2.1.2. Komunikasi Politik Kepala Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah adalah pemegang peran yang penting dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, calon kepala daerah

yang akan dipilih maupun yang sudah terpilih harus memegang erat prinsip tersebut. Kepala daerah merupakan figur yang inovatif, punya wawasan luas, mempunyai kesiapan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Seseorang kepala daerah baik yang akan terpilih atau yang sudah menjabat, harus memiliki *political leadership* yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Jabatan tersebut yang telah mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin daerah haruslah mempunyai kepemimpinan di bidang organisasi dan sosial. Dikarenakan nasib rakyat sangat banyak ditentukan oleh pemimpin politik. Pejabat daerah juga dikenal sebagai elit politik lokal yaitu yang memerintah di tingkat daerah dan memegang peranan penting dalam komunikasi politik yang sudah seharusnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Persoalan hiruk pikuk seorang pemimpin daerah akan menimbulkan berbagai macam persepsi, juga bisa ketahapan demonstrasi.

Komunikasi yang baik justru terjadi setelah adanya kerusuhan pada demonstrasi. Banyaknya kerusuhan menandakan belum terjalin komunikasi efektifnya komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala daerah serta jajaran pegawainya kepada masyarakat. Devito dalam (Budianto dan Hamid, 2011: 317-324), menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif, perilaku positif, dan kesamaan.

Penjelasan mengenai komunikasi efektif adalah sebagai berikut:

1. Sifat keterbukaan menunjukkan seorang calon kepala daerah atau kepala daerah membuka diri pada masalah yang berkaitan

dengan publik sehingga publik mengetahui gagasan, pendapat, pikiran kepala daerah.

2. Empati merupakan kemampuan seorang calon kepala daerah atau kepala daerah untuk menempatkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain.
3. Perilaku suportif adalah seorang calon kepala daerah atau kepala daerah dalam menghadapi suatu masalah tidak bersikap defensif
4. Perilaku positif adalah seorang calon kepala daerah atau kepala daerah harus memiliki pandangan positif terhadap dirinya dan mempunyai perasaan positif terhadap orang lain dalam berbagai situasi komunikasi
5. Kesamaan adalah seorang calon kepala daerah atau kepala daerah merasa setara dengan rakyat yang dipimpinnya. Dia tidak boleh menganggap bahwa derajatnya lebih tinggi dari pada orang lain. (Budianto dan Hamid, 2011: 317-324).

2.1.3 Persepsi

Persepsi (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma),

dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.

Sejak ditemukannya psikologi eksperimen pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi telah berkembang melalui penggabungan berbagai teknik. Dalam bidang psikofisika telah dijelaskan secara kuantitatif hubungan antara sifat-sifat fisika dari suatu rangsangan dan persepsi. Ilmu saraf sensoris mempelajari tentang mekanisme otak yang mendasari persepsi. Sistem persepsi juga bisa dipelajari melalui komputasi, dari informasi yang diproses oleh sistem tersebut. Persepsi dalam filosofi adalah sejauh mana unsur-unsur sensori seperti suara, aroma, atau warna ada dalam realitas objektif, bukan dalam pikiran perseptor. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>)

Banyak definisi mengenai persepsi menurut para ahli. Menurut Leavitt, definisi persepsi secara sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sedangkan Atkinson et.al mengungkapkan bahwa persepsi berupa proses penggabungan stimulus sederhana (sensasi) yang diterima oleh panca indera manusia sehingga stimulus-stimulus tersebut memberikan makna tertentu bagi manusia. Zimbardo mengemukakan bahwa persepsi memberikan suatu makna terhadap hal-hal dan persepsi membuat suatu arahan dalam perilaku orang. Tanpa proses organisasi pada persepsi, kita tidak akan melihat objek, ruang, kejadian-kejadian, gerakan,

orang, atau hubungan-hubungan, dan akan mengarahkan kita pada suatu dunia yang tidak bermakna, sensasi-sensasi yang acak (Satria dan Elhaq, 2011: 98). Menurut Stenberg, persepsi merupakan proses waktu bagi individu untuk mengenal, mengorganisasikan, dan memaknai sensasi yang diperolehnya dari stimulus lingkungan, sehingga stimulus tersebut bermakna atau tidak bagi individu (Astuti, 2005).

Jalaluddin Rakhmat (2011: 50) dalam bukunya Psikologi Komunikasi mengilustrasikan mengenai persepsi yakni; Coba anda letakkan sebuah buku dalam keadaan terbuka kira-kira 50 cm di muka anda. Anda melihat huruf-huruf yang kabur. Dekatkan buku ini pada mata anda perlahan-lahan. Sekarang huruf-hurufnya tampak jelas. Hal tersebut dinamakan dengan sensasi. Lalu ketika anda melihat huruf, merangkaikannya dalam kalimat dan mulai menangkap makna yang anda baca, maka pada proses ini dikatakan dengan persepsi. Rakhmat mendefinisikan perspsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi. Dalam menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori (Rakhmat, 2011: 50).

Senada dengan hal tersebut, persepsi adalah proses memberi makna setelah sensasi sehingga diperoleh pengetahuan yang baru. Kretch dan Crutchfield menyebutkan ada dua faktor sensasi yakni faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional adalah objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

Sedangkan faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf tiap-tiap individu. Robert G. King dalam Yuniati (2002: 83) mengungkapkan ada lima (5) tahapan dalam proses pembentukan persepsi adalah sebagai berikut:

- a. *Gathering*; Proses penerimaan stimulus eksternal yang terhubung pada sistem saraf tubuh individu.
- b. *Selecting*; Proses mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang dapat diproses.
- c. *Mixing*; Proses pencampuran antara ide-ide dan pengetahuan yang kita miliki.
- d. *Organizing*; Proses mengorganisasikan tahap sebelumnya, lalu menyempurnakan atau mengubah kreasi sesuai dengan penerimaan dari realita.
- e. *Interpreting*; Merupakan langkah terakhir dari proses persepsi. Individu mencoba untuk menafsirkan suatu makna dari informasi yang diterima lalu menciptakan kesimpulan (Yuniati, 2002: 84).

Persepsi merupakan kajian dari psikologi komunikasi untuk melihat stimulus atau respon yang diperkirakan ada didalam seorang komunikator atau komunikan. Dapat dikatakan bahwa persepsi adalah proses diterimanya stimulus oleh indera manusia yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan yang kemudian menghasilkan suatu pandangan, pengamatan atau tanggapan terhadap objek stimulus yang bisa berupa benda, kejadian, tingkah laku manusia, serta efek yang ditimbulkannya. Sebagaimana halnya sensasi, memori, dan berpikir yang menjadikan persepsi salah satu proses dalam menerima sebuah informasi. Alur

persepsi ada setelah terjadi sensasi yang ditangkap panca indra, menjadilah sebuah pendapat terpendam seseorang sebelum proses penyimpanan informasi dan berpikir.

Demikian juga yang terjadi pada **Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan Tentang Calon Gubernur Berlatar Belakang Dari TNI Pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018**, maka akan mempengaruhi bagaimana mereka akan bersikap ataupun bertindak sesuai dengan apa yang mereka fahami.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, sebagai berikut (Jalaludin Rakhmat, 2011: 54), yaitu :

- a. Faktor-faktor fungsional Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield (Jalaludin Rakhmat, 2011: 55) merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.
- b. Faktor-faktor struktural Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Calon Gubernur Dari TNI Pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

2.1.4 Beberapa Mantan Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Dibawah ini adalah redistribusi Gubernur Sumatera Utara yang pernah menjabat sebelum dan sesudah era reformasi dari golongan TNI, antara lain sebagai berikut:

1. Raja Djundjungan Lubis. Lahir di Huta Godang, Ulu Pungkut, Mandailing Natal; adalah Gubernur Sumatera Utara yang ke 6. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Sipil Daerah Militer Tapanuli tahun 1945. Masa jabatan 1 April 1960 – 5 April 1963 pada masa presiden Soekarno (era sebelum reformasi). Pernah menjadi walikota Sibolga dengan masa jabatan 11 Februari 1954 – 31 Desember 1957 (*di akses pada 12 Januari 2018* https://id.wikipedia.org/wiki/Raja_Djundjungan_Lubis).
2. Ulung Sitepu ataupun Brigjend. Ulung Sitepu merupakan seorang tokoh militer, pejuang, dan Gubernur Sumatera Utara ke-8, yang menjabat sebagai Gubernur Sumut sejak 15 Juli 1963 hingga 16 November 1965. Dia tidak dapat mengakhiri priode jabatannya(5 tahun) dikarenakan dituduh terlibat dengan gerakan G30S/PKI, walau pun hingga saat ini tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. (*di akses pada 12 Januari 2018* https://id.wikipedia.org/wiki/Ulung_Sitepu).
3. Mayor Jenderal TNI (Purn) Marah Halim Harahap (lahir di Tabusira, Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 28 Februari 1921 – meninggal di Medan, Sumatera Utara, 3 Desember 2015 pada umur 94 tahun) adalah Gubernur Sumatera Utara pada periode 1967-1978, ia dilantik sebagai

Gubernur Sumatera Utara menggantikan P.R. Telaumbanua. Selepas menjadi Gubernur, ia aktif dalam bidang olahraga di tanah air dengan menjadi pengurus olahraga nasional. Namanya diabadikan menjadi salah satu piala bergilir dalam turnamen sepak bola nasional yakni Piala Marah Halim. Menjabat di era sebelum reformasi (*di akses pada 12 Januari 2018* https://id.wikipedia.org/wiki/Marah_Halim_Harahap).

4. Mayjen TNI (Purn) Edward Waldemar Pahala Tambunan atau lebih dikenal dengan nama E.W.P. Tambunan (lahir di Balige, Sumatera Utara, 1927 - meninggal di Jakarta, 17 Januari 2006) adalah Gubernur Sumatera Utara periode 1978-1983. Jenazahnya dimakamkan di makam pahlawan Kalibata, Jakarta. Tambunan dikenal karena merupakan penggagas salam Sumatera Utara seperti "Horas", "Majua-jua", "Penjua-jua", "Ahoi". Tambunan juga dikenal karena menduniakan Pesta Danau Toba, pesta budaya terbesar di Sumatera Utara yang menjadi daya tarik bagi wisatawan (*di akses pada 12 Januari 2018* https://id.wikipedia.org/wiki/Pahala_Tambunan).
5. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Kaharuddin Nasution lahir di Medan, Sumatera Utara, 23 Juli 1925 – meninggal di Jakarta, 25 September 1990 pada umur 65 tahun) adalah tokoh politik dan militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 1983–1988 yang terpilih menggantikan EWP Tambunan. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Riau dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Namanya diabadikan menjadi nama stadion di Pekanbaru, Riau. Karir pemerintahan antara lain Gubernur Provinsi Riau (1960–1966),

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau (1962–1967), Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Golongan Daerah (1962–1967), Ketua Dewan Rektor Universitas Negeri Riau (1963–1967), Inspektur Jenderal Departemen Penerangan RI (1973–1982), Gubernur Provinsi Sumatera Utara (1983–1988). Karir Militer, Komandan Kompi (1945–1948), Komandan Batalyon Siliwangi (1948–1953), Direktur Battle Training Camp I (1952–1953), Komandan Batalyon Basis I (1953–1956), Komandan RPKAD (1956–1958), Komandan Komando Resor Militer Wirabima (1960), Panglima Komando Daerah Militer XIII (1967–1971), Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (1971–1973). Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, 1981 oleh Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia (*di akses pada 12 Januari 2018* https://id.wikipedia.org/wiki/Kaharuddin_Nasution).

6. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Raja Inal Siregar (lahir di Medan, Sumatera Utara, 5 Maret 1938 – meninggal di Medan, Sumatera Utara, 5 September 2005 pada umur 67 tahun) adalah Gubernur Sumatera Utara ke-13. Ia memerintah dari tahun 1988 hingga 1998. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, ia kemudian menjadi anggota DPD dari Sumatera Utara. Putra pasangan Kario Siregar dan Rodiah Hutasuhut ini lulus Akademi Militer pada tahun 1961. Raja Inal Siregar menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di beberapa tempat di Sumut dan Sumbar. Karier militernya dimulai di Desa Ampat, Kalimantan Tengah. Berbagai jabatan pernah didudukinya, antara lain sebagai Komandan Kompi (Danki) Yonif B Purwokerta (1965–1967), Kepala

Biro Operasi Kowanda Ujung Pandang (1967-197), Wakil Asisten I/Intelijen Kodam II/Bukit Barisan (1975-1978), Asisten I/Intelijen Kodam I/Iskandar Muda (1978-1982).Kemudian Asisten I/Intelijen Kodam IV/Siliwangi (1982-1983), Kepala Staf Kodam II/BB (1983-1984), Pangdam XIII/Merdeka di Manado (1984-1985), Pangdam III/Siliwangi di Bandung (1985-1988), Gubernur Sumatera Utara di Medan (1988-1999) dan terakhir menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak tahun 2004 (*di akses pada 12 Januari 2018 https://id.wikipedia.org/wiki/Raja_Inal_Siregar*).

7. Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 21 Februari 1948 – meninggal di Medan, Sumatera Utara, 5 September 2005 pada umur 57 tahun) adalah Gubernur Sumatera Utara ke-14, menjabat dari tahun 1998 hingga meninggal dunia pada 5 September 2005. Saat itu ia sedang bertugas dalam periode keduanya (2003-2008). Pada periode sebelumnya (1998-2003), Rizal Nurdin juga merupakan Gubernur Sumut. Sebelum menjadi Gubernur, dia adalah Pangdam I Bukit Barisan tahun 1997, dengan Pangkat Mayor Jenderal. Nurdin terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada 15 Juni 1998. Jabatan Gubernur Sumut untuk periode kedua disandanginya pada 24 Maret 2003, dan seyogyanya berakhir pada 15 Juni 2008. Tengku Rizal Nurdin yang berdarah Melayu dan Minang ini, merupakan kakak kandung dari Tengku Erry Nuradi, wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018. Dari pernikahannya dengan Hj. N.R. Siti Maryam (lahir tahun 1948), Rizal memperoleh dua orang putri, yaitu T. Armilla Madiana dan T. Arisma Mellina. Selain itu, Rizal Nurdin juga adalah

Ketua KONI Sumut. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Mandala Airlines pada 5 September 2005 di Medan. Saat itu ia sedang berada dalam perjalanan untuk menghadiri rapat mendadak dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada malam harinya. Tengku Rizal Nurdin dianugerahi Bintang Mahaputra oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 November 2005 berkaitan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2005 dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 083/TK/2005 (*di akses pada 12 Januari 2018* https://id.wikipedia.org/wiki/Tengku_Rizal_Nurdin).

2.1.5 Militer Masa Orde Baru

Pemerintahan orde baru di bawah kendali Soeharto menempatkan militer pada tempat spesial baik atas dasar ikatan psikologis ataupun keyakinan atas militer sebagai motor pembangunan dan penilaian atas ketidakmampuan pemerintahan sipil. Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada militer adalah menempatkannya pada posisi strategis pemerintahan, legislatif ataupun posisi strategis Golkar. Pada akhir 1970-an, separuh anggota kabinet dan sepertiga jabatan Gubernur dijabat oleh militer. Pada tingkat bupati dan walikota, 56 persen adalah militer, direktur jenderal 70 persen, dan sekretaris menteri 84 persen diduduki oleh militer. Sementara itu data yang lebih lengkap di ungkapkan oleh Jenkins pada tahun 1977 dan 1980 terkait dengan dominasi militer yang bertugas diluar Hankam.

Pada tahun merupakan 1966 dari 27 anggota kabinet yang diangkat 44 persen menteri anggota ABRI, 6 berasal dari TNI AD dan 6 menteri lainnya

berasal dari panglima-panglima angkatan lain. Pada tahun 1968 komposisi anggota ABRI yang duduk dikabinet berubah atau turun menjadi 23 orang.

Keterlibatan militer dalam birokrasi lokal selain melalui jabatan Bupati dan Gubernur adalah keterlibatan pimpinan militer melalui Muspida dan Muspika yang berfungsi mengendalikan kehidupan masyarakat daerah terutama dalam kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi rakyat untuk pembangunan dan untuk Pemilihan Umum.

Penetrasi dan penguasaan militer atas birokrasi pada masa orde baru dapat dilihat pula dalam penelitiannya MacDougall, tahun 1982 menggambarkan bahwa presentase pejabat militer lebih dominan dibanding sipil dalam jajaran birokrasi pusat tertinggi dengan menganatomi personalia tertinggi seluruh departemen yang ada dari mulai Menteri Koordinasi (Menko) sampai dengan Direktur Jenderal (Dirjen), MacDougall juga menemukan fakta bahwa pada departemen-departemen strategis jumlah militer sangat dominan dibandingkan sipil. Penelitian MacDougall 4 tahun kemudian (1986), setelah kabinet berganti ditahun 1983, memperlihatkan tidak terjadi perubahan signifikan perimbangan militer-sipil didalam birokrasi pusat tertinggi. Militer mengisi 64 persen jabatan pembantu dekat Presiden, 38 persen Menteri, 67 persen Sekretaris Jenderal, 67 persen Inspektur Jenderal, dan 20 persen Direktur Jenderal. .

ABRI juga berada di lembaga legislatif sampai dengan tahun 2004 melalui mekanisme pengangkatan. Para perwira membentuk fraksi ABRI di MPR, DPR, DPRD TK I dan DPRD TK II, menjalankan fungsi penting seperti

menempatkan aspek keamanan dan pertahanan dalam setiap perdebatan UU, memperjuangkan kebijakan sosial-politik yang berasal dari Panglima ABRI. Seringkali kantor anggota Fraksi ABRI di sebuah wilayah konstituensi menjadi pusat penyelesaian sejumlah persoalan lokal yang tidak bisa dilakukan melalui badan legislatif setempat. Keberadaan fraksi ABRI dimulai pada dekade 1965-1969 atau zaman DPR-GR sebanyak 43 orang, dekade 1970-1979 ABRI memiliki wakil di DPR/MPR sebanyak 75 orang. Dekade 1980-1989 jumlahnya meningkat menjadi 100 orang.

Dekade 1990-1998 jumlahnya turun kembali menjadi 75 orang. Pada 1 Februari 1999 disahkannya UU No.4 tahun 1999 mengurangi perwakilan militer dari 75 kursi menjadi 35 kursi baik di DPR ataupun MPR serta membatasi keberadaan ABRI 10 persen di DPRD I dan II. Melalui sidang MPR Oktober 1999 Keberadaan anggota F-ABRI dihapuskan di DPR dan hanya ada di MPR sebanyak 38 wakil sampai dengan tahun 2004. Berakhirnya keberadaan ABRI di MPR dengan disahkannya UU No.22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sejak pemilu 1971, ABRI juga memiliki perwakilan ditingkat DPRD I atau II dengan jumlah yang variatif.

Dominasi militer juga terjadi pada struktur Golkar, kondisi ini bisa dipahami dikarenakan Golkar adalah partai bentukan militer yang dibuat untuk ikut dalam Pemilu untuk mendapatkan legitimasi rakyat atas pemerintahan orde baru. Hubungan Golkar-militer cukup dimanis, dimulai dari dominasi militer didalam tubuh Sekber Golkar. Ketua Sekber Golkar di Dati I pada umumnya dijabat purnawirawan ABRI dan banyak pula yang masih aktif. Ketua Sekber Dati

II hampir semuanya dijabat anggota ABRI aktif. Pada Munas 1 Golkar di Surabaya, 4-9 September 1973, ABRI menempatkan perwira aktif ke dalam struktur DPP dan hampir seluruh daerah tingkat I dan daerah tingkat II jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Pada Munas II Golkar, militer memperkuat dominasinya dengan dibentuknya Dewan Pimpinan Harian yang diketuai oleh Jenderal M. Panggabean. Pada Munas II ini dipilihnya Soeharto sebagai ketua Dewan Pembina yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus DPP. Pada Munas III komposisi DPP Golkar untuk pertama kalinya didominasi kalangan sipil, hampir tidak ada kalangan militer aktif yang duduk dalam jajaran kepengurusan. Kondisi ini menimbulkan multi tafsir ada yang melihat pada kenyataannya, para pemimpin muda Golkar yang berasal dari kalangan sipil hanya dimanfaatkan oleh para tokoh tua untuk melaksanakan keputusan-keputusannya.

Ada yang melihat bahwa hilangnya perwira aktif dalam jajaran kepengurusan Golkar merupakan upaya ABRI untuk mulai "menyapah" Golkar. Pada Pemilu 1992 militer kembali dipimpin tokoh militer (Wahono), akan tetapi pada pemilu ini banyak purnawirawan ABRI yang menyebrang ke PDI. Dominasi militer mulai memudar pada Munaslub Oktober 1998 dimana Akbar Tandjung terpilih sebagai ketua umum mengalahkan Eddy Sudrajat. Hubungan ABRI dengan Golkar terputus dengan dikeluarkannya 17 butir langkah-langkah perubahan dasar ABRI pada tahun 1999. Pada poin ke-11 ditegaskan bahwa dilakukan pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik yang ada.

Ada dua hal yang menarik dalam dominasi perpolitikan di Indonesia pada masa orde baru. *Pertama*, adanya tren penurunan dominasi militer tiap repelita. Anggota ABRI yang menduduki jabatan Gubernur misalnya; pada Pelita I sebesar 73 persen, pada Pelita II sebesar 76,9 persen, pada Pelita III sebesar 59,2 persen, pada pelita IV sebesar 51,8 persen, pada pelita V hanya tinggal 44,4 persen. Tren yang sama terjadi pada komposisi anggota Kabinet Pembangunan. Jika dalam tiga Pelita pertama, rata-rata 31,2 persen anggota kabinet adalah ABRI aktif, maka dalam tiga Pelita terakhir rata-rata hanya 9,6 persen anggota kabinetnya yang berasal dari ABRI aktif. Tren ini dapat ditemukan pula dalam komposisi sipil-militer pejabat asisten menteri, duta besar, bupati dan jabatan-jabatan eksekutif lainnya.

Kecenderungan ini memperlihatkan 2 (dua) hal; *pertama*, Eep Saefullah Fatah melihatnya sebagai sebuah skenario dari Soeharto dan ABRI yang menjelmakan diri menjadi kekuatan prodemokrasi dan penghela perubahan politik dengan mengurangi porsi militer dalam kedudukan politik. ABRI yang semakin dewasa terlihat pula pada sikap menjaga jarak dari semua partai pada pemilu 1992. Keterlibatan ABRI dalam kasus pelanggaran pemilu hanya 4,6 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan birokrasi pemerintahan 29 persen dan badan-badan penyelenggara pemilu 60,6 persen. Keterlibatan militer dalam banyak negara kondisinya mayoritas hanya sebatas "Moderator Pretorian" atau "Pengawal Pretorian" jarang yang menjadi "Penguasa Pretorian". Pada jenis "Moderator Pretorian", militer menggunakan hak veto atas keputusan pemerintahan politik, tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri. "Pengawal

Pretorian”, militer menggulingkan sebuah pemerintahan sipil, umumnya mereka sendiri yang akan memegang tampuk pemerintahan untuk periode tertentu. Pada posisi ini militer mempertahankan status quo sebagai keadaan terwujud sebelum kegagalan sipil, militer juga akan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan menangkali inflasi yang membumbung, anggaran belanja yang berlebihan, neraca pembayaran yang defisit yang terjadi pada pemerintahan sipil.

Militer bersifat otoriter akan tetapi tidak menghapus partai politik, pergerakan kelompok, surat kabar, dan serikat pekerja secara keseluruhan, akan tetapi membolehkan sebagian dengan batasan atau kontrol yang ketat. Walaupun ciri-ciri ”Pengawal Pretorian” terdapat pada pemerintahan militer Orde Baru, akan tetapi masih berat menyakini militer Indonesia mempunyai rencana untuk menarik diri dari dominasi politik Indonesia. Sebab, semakin pudarnya peran politik militer pada orde reformasi lebih dikarenakan desakan masyarakat untuk menghapus konsep dwi fungsi ABRI, ketimbang insiatif militer atas dasar kerelaan. *(diakses pada Februari 2018 https://sefasdesak.wordpress.com/2011/05/10/perbandingan-partisipasi-politik-zaman-orde-baru-dengan-era-reformasi/#_ftn4).*

Kondisi politik pasca Orde Baru juga menuntut perumusan baru tentang fungsi dan kedudukan tentara. Suara yang paling keras adalah tuntutan untuk menghilangkan fungsi sosial politik tentara, baik di parlemen maupun di pos-pos sosial politik lainnya. Hal ini jelas bukan soal yang mudah. Sekian dasawarsa tentara telah terlibat dalam fungsi-fungsi sosial politik. Pengembalian angkatan bersenjata ke barak secara drastis merupakan suatu putusan yang bisa mendatangkan dislokasi-dislokasi sosial politik.

Jatuhnya Soeharto telah melahirkan satu perubahan besar dalam sistem perpolitikan Indonesia secara umum. Secara khusus, dalam perspektif hubungan sipil-militer, telah terjadi titik balik yang ditandai dengan kritik-kritik tajam atau bahkan hujatan terhadap militer sepanjang Soeharto berkuasa. Tuntutan terhadap reformasi peran militer pun muncul dari berbagai komponen masyarakat, termasuk dari kalangan militer sendiri. Penghapusan dwi fungsi ABRI juga menjadi salah satu pilar reformasi yang diajukan komponen gerakan reformasi, terutama kalangan mahasiswa. Pada awal masa reformasi itu pula lah, ABRI dikecam dan dicaci oleh rakyat, terutama mahasiswa, karena perannya sebagai alat kekuasaan yang otokratis pada masa Orde Baru. ABRI dianggap paling bersalah terhadap krisis yang dihadapi bangsa Indonesia. Namun, ABRI tetap tegar dan secara berlanjut ikut mengambil bagian dalam upaya mengatasi krisis, khususnya mencegah disintegrasi bangsa dan mengawal reformasi nasional.

Tuntutan terhadap perlunya reposisi ABRI berkait erat dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern terutama menyangkut pembagian kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi dalam era reformasi ini posisi ABRI masih perlu dipertanyakan karena ABRI pada era reformasi belum sepenuhnya meninggalkan lapangan politik. Akan tetapi yang ingin dikemukakan disini adalah cara penanganan terhadap tentara berkaitan dengan reformasi peran mereka. Bahwa tentara ikut menangani masalah sosial politik bukan zamannya lagi. Kenyataan bahwa tentara Indonesia sudah sekian lama berpolitik, hal itu hendaknya dijadikan pertimbangan dalam merumuskan peran mereka. Oleh karena itu kemudian muncullah kritikan-kritikan dari berbagai

kalangan untuk mengkaji ulang mengenai konsep Dwi Fungsi ABRI yang disalahgunakan. Dwi Fungsi ABRI Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI telah mengalami distorsi, khususnya tentang penafsiran terhadap fungsi sosial politik ABRI yang dilaksanakan sekedar alat rezim yang berkuasa untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan. Peran sosial-politik ABRI yang tercakup dalam konsep Dwi Fungsi ABRI, sudah saatnya ditinjau kembali agar lebih aktual dan seiring dengan perkembangan jaman modern, yang makin menuntut adanya spesialisasi peran. Dengan demikian, sistem politik Indonesia dapat berjalan seperti yang selama ini berlangsung secara normal di dunia internasional. Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa diungkap mengenai latar belakang penolakan terhadap Dwi Fungsi ABRI yaitu :

1. Dwi Fungsi ABRI telah mendorong tentara untuk terlalu jauh terlibat dalam pemerintahan. Dalam kenyataannya, dampak negatif seringkali lebih muncul. Kekuatan yang kuat di politik telah merangsang ABRI mengurus atau menentukan bisnis di masyarakat. Bisnis ini dalam perkembangannya semakin memperkuat posisi tentara dalam pemerintahan, dan memperiferikan hak-hak ekonomi masyarakatnya.
2. Dwi Fungsi ABRI nyata telah membuka penderitaan rakyat sipil. Tak jarang dengan kekuatannya, tentara melakukan penyiksaan, penculikan, pemenjaraan, pengusuran dan lain-lain. Sejarah politik di negeri ini sarat dengan keterlibatan tentara dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan rakyat. Anehnya, tentara memihak ke negara bukan ke rakyat.

3. Jika Dwi Fungsi ABRI itu masih dipertahankan, selama itu pula demokrasi berada dalam ancaman. Dalam tataran praktis, tentara sulit diajak untuk hidup berdemokrasi.

Di satu sisi memang harus diakui bahwa keterlibatan militer dalam politik memberikan kinerja yang efisien karena penerapan disiplin ala militer cukup ketat. Namun disisi lain, akibat negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Diantaranya adalah mempersempit ruang gerak sipil, serta adanya kecenderungan pemaksaan kehendak. Akibat yang lebih buruk lagi adalah ABRI justru tidak mampu menjalankan tugas utamanya untuk menjaga keamanan. Jika militer tetap pada pendirian dengan Dwi Fungsinya, maka akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya:

1. Militer yang terlibat dalam politik akan merusak kompetisi politik.
2. Militer yang terlibat politik akan mendistorsi kebijakan politik. Negara demokrasi memisahkan secara tegas antara pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan politik. Pengambilan kebijakan politik diserahkan kepada partai pemenang pemilu. Sedangkan pelaksana kebijakan politik diserahkan kepada aparatur negara, dalam hal ini birokrasi dan militer. Militer harus dinetralkan secara politik karena sifatnya sebagai aparatur negara.
3. Militer ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Jika militer diberikan peranan politik, mereka dapat menjadikan keamanan negara sebagai “alat” dalam rangka menguasai politik keamanan, dengan menciptakan kerusuhan sosial yang pada gilirannya membahayakan keamanan negara.

Desakan agar militer kembali kepada peran semulanya sebagai alat pertahanan keamanan pada masa Orde Baru memang telah menjadi suatu perbincangan. Tuntutan terhadap penghapusan Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru terjadi sekitar tahun 1978, banyak mahasiswa yang berunjuk rasa dengan memasang poster dengan seruan “Kembalikan ABRI kepada rakyat”Salim Said. Namun, keinginan untuk menyampaikan hal tersebut terhalang karena sikap otoriter rezim Orde Baru yang menahan siapa saja yang menentang keputusan pemerintah. Oleh karena itu Dwi Fungsi ABRI kemudian berkembang dengan leluasa tanpa ada yang berani untuk memberikan kritiknya.Sorotan masyarakat terhadap ABRI sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum datangnya arus reformasi. Keruntuhan Soeharto mendorong dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan secara lebih keras kesalahan-kesalahan ABRI di masa lalu. Gugatan yang datang begitu gencar tak lain karena banyaknya luka lama yang belum disembuhkan.

Dengan jatuhnya Soeharto membuka kesempatan bagi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam tubuh ABRI yang terlalu jauh mencampuri urusan sosial politik yang seharusnya bukan menjadi bagiannya. Masyarakat semakin berani untuk melakukan perlawanan karena telah memendam keinginan tersebut sejak lama. Kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan itu pun terinspirasi dari tuntutan mundurnya Soeharto, seperti telah diketahui bahwa militer adalah bagian dari Soeharto sebagai alat pelanggeng kekuasaan. Desakan kuat dari masyarakat yang tidak lagi menghendaki militer berpolitik dan menuntut dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI di era reformasi 1998,

ternyata mampu melahirkan reformasi di tubuh militer (*di akses pada 12 Januari 2018 dari www.landasanteori.com/2015/10/penghapusan-dwi-fungsi-abri-pasca-orde.html*).

2.1.6 Militer di Era Reformasi

Tampilnya Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI pada 2004, melalui pemilihan umum secara langsung, sekaligus sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia, sedikit mengubah posisi TNI.

SBY tidak serta merta mengembalikan TNI ke panggung kekuasaan. Tetapi di era SBY keinginan TNI untuk kembali berkuasa, semakin terdengar. Makin lama makin nyaring. Mereka yang memperdengarkan suara itu antara lain melalui mantan Panglima TNI Wiranto, eks Panglima Kostrad Prabowo Subianto dan bekas Gubernur DKI Jaya Sutiyoso.

Ketiga jenderal purnawirawan di atas, masing-masing memimpin partai dan ketiga partai mereka Hati Nurani Rakyat atau Hanura (Wiranto), Gerakan Indonesia Raya/Gerindra (Prabowo) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (Sutiyoso) akan ikut dalam Pemilu 2014.

Suara ketiga bekas jenderal ini tentu saja patut didengar. Keinginan TNI, kalau boleh direpresentasikan oleh Wiranto, Prabowo dan Sutiyoso bukan hal yang melanggar demokrasi dan tata krama politik. Namun yang perlu digaris bawahi, jika TNI masih bercita-cita menjadi penguasa, cita-cita atau ambisi itu, bakal dilihat sebagai sebuah pemaksaan. Sebuah obsesi yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Reformasi di Indonesia, patut diakui masih belum sesuai dengan keadaan yang diinginkan oleh masyarakat madani, masyarakat sipil. Tapi arah reformasi, akan kembali berubah dan lebih berbelok arah lagi jika kekuasaan di Indonesia kembali harus dipimpin TNI yang secara harafiah merupakan kelompok minoritas.

Yang paling aman atau ideal, apabila TNI tetap memperoleh peran, tetapi peran itu tidak harus dalam bentuk sebagai "panglima" atau berada di pucuk pimpinan nasional. TNI perlu diberi tempat strategis tanpa harus menjadi Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. TNI harus menjadi unsur terpenting dalam mengamankan perjalanan reformasi dan eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Dan kalau posisi dan peran itu yang dialokasikan untuk TNI, kursinya cukup banyak. Jumlah kursi banyak, sebab kursi-kursi itu berada di berbagai lembaga, mulai dari pusat hingga di daerah.

Mari kita undang TNI untuk menjaga seaman mungkin posisi-posisi seperti Ketua MPR-RI Ketua DPR-RI, Ketua DPD-RI dan seterusnya, hingga ke insitutsi level paling bawah.

Sebab kalau kita berpikir sebagai sebuah kesatuan dalam bingkai NKRI, tugas TNI memang lebih tepat untuk menjadi penjaga keamanan, yakni mengamankan NKRI. Tapi mengamankan NKRI saja tidak cukup. TNI harus mengawal pimpinan nasional agar sebagai Presiden/Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, siapapun dia harus dibantu dan didukung. *(diakses pada 22 April*

2017 dari <https://nasional.inilah.com/read/detail/2035777/posisi-ideal-militer-di-era-reformasi>).

Demokratisasi politik tingkat nasional kemudian melahirkan produk regulasi politik dan kebijakan yang menata sistem keamanan nasional. Ini tercermin dalam langkah positif yang berarti berupa pemisahan TNI dan Polri, April 1999. tindakan kepolisian akan lebih oleh aparat kepolisian tanpa harus khawatir dengan intervensi kepentingan militer (Crisnandi, 2005: 94). Kemajuan ini lalu diperkuat oleh TAP MPR No. VI Tahun 2000 dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang mengatur tentang pemisahan peran TNI dan Polri. Pada tahun yang sama, dilakukan amandemen konstitusi UUD 1945, termasuk ketentuan Pasal 30 mengenai pertahanan dan keamanan negara yang menegaskan pembedaan fungsi pertahanan dan keamanan. Langkah-langkah ini sempat menimbulkan polemik. Kepentingan pemisahan organisasi antara TNI dengan Polri adalah sesuatu yang mendesak. Namun sebagian kalangan menilai pemisahan tugas dan peran yang dikotomis antara pertahanan dan keamanan, berpotensi menimbulkan masalah, diantaranya kebingungan dalam menangani kejahatan transnasional dan potensi konflik antara personel Polri dan TNI di lapangan. (Kontras, 2008: 6).

Arus reformasi juga mulai mengurangi dominasi Angkatan Darat (AD) dalam TNI. Pada era Soeharto berkuasa, jabatan Panglima TNI selalu berasal dari AD. Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden, mendobrak tradisi ini dengan mengangkat seorang Marsekal Angkatan Laut (AL) sebagai Panglima TNI. Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid

membuat jabatan Panglima TNI diisi kembali dari AD. Di penghujung pemerintahan Megawati, Undang-undang 34/2004 tentang TNI disahkan dan menyatakan bahwa posisi Panglima TNI dijabat secara bergantian. Upaya melanjutkan kepemimpinan TNI di bawah Jenderal (AD) Ryamizard Ryacudu sempat memicu kontroversi, saat Presiden hasil Pemilu 2004 Susilo Bambang Yudhoyono tetap memutuskan Marsekal TNI AU Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI.

Kontras mencatat, pasca 2004 banyak anggota TNI, baik purnawirawan maupun yang masih aktif ikut dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (pilkada). Meskipun jauh-jauh hari Panglima TNI yang waktu itu dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto sudah memperingatkan mengenai netralitas TNI dalam pilkada, serta tidak diperkenalkannya anggota TNI aktif untuk ikut mencalonkan diri, namun kembali fakta di lapangan berkata lain, beberapa anggota TNI aktif tetap tergoda untuk ikut bertarung berebut kursi Gubernur/wakil Gubernur ataupun walikota/bupati. Fenomena ini sebenarnya disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, persoalan regulasi politik yang memang masih memberi peluang bagi anggota aktif TNI untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Walaupun dalam UU TNI Pasal 39 Ayat (4) sudah ditegaskan, setiap prajurit (anggota TNI aktif) dilarang untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya, UU Pemilihan Umum masih memberi celah tersebut. Anggota TNI aktif boleh mencalonkan diri sebagai calon dalam Pemilu dengan syarat harus berstatus non aktif yang bersifat sementara, jika terpilih baru kemudian diberhentikan/pensiun dini. Celah inilah

yang membuat TNI secara institusional tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang berniat untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum. Kedua, tentu persoalan paradigma juga masih merupakan masalah pokok. Sejak proses reformasi 1998, TNI gagal untuk meredefinisikan atau merevitalisasi paradigma mengenai “TNI adalah tentara rakyat” yang lahir dari rakyat dan bersama rakyat. Paradigma ini cenderung mengaburkan hubungan sipil militer dalam sistem negara, sehingga dengan berbekal paradigma itu, TNI selain berperan dalam pertahanan negara juga harus memiliki peran di wilayah publik seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kegagalan meredefinisikan paradigma ini, membawa figur-figur militer masih terus tergoda untuk masuk ke wilayah publik, contoh nyatanya adalah pilkada. Celaknya kegagalan paradigmatik ini diikuti dengan tumpulnya analisa politik dari kalangan militer dalam membaca perubahan, peluang politik yang ditawarkan partai politik tidak seiring dengan kesadaran dan minat pemilih (Crisnandi, 2005: 94).

Hal ini dibuktikan dengan tumbanganya beberapa figur militer di beberapa pilkada. Contohnya adalah gagalnya Tayo Tahmadi di Jawa Barat yang disusul kalahnya Agum Gumelar pada pemilihan Gubernur selanjutnya di Jawa Barat. Hal yang sama dialami Tritamtomo di Sumatera Utara, disusul Letkol (Bais) (Crisnandi, 2005: 94). Didi Sunardi di Serang Banten, dan Kolonel (Inf) DJ Nachrowi di Ogan Ilir Sumatera Selatan. Belum lagi pertarungan dua Jenderal purnawirawan yakni Letjend TNI (Purn) Bibit Waluyo dan Mayjen TNI (Purn) Agus Suyitno di Jawa Tengah. Kekalahan-kekalahan ini menunjukkan bahwa pilihan rakyat tidak lagi menyandarkan pilihannya pada figur yang berlatar

belakang militer, sehingga sangat merugikan bagi TNI, jika melepaskan kader-kader terbaiknya untuk bertarung dalam kontestasi pemilu. Tenaga dan pikiran mereka akan berkontribusi lebih banyak jika fokus pada tugas pokok TNI yang diamanatkan konstitusi kita sebagai alat pertahanan negara (Crisnandi, 2005: 7).

Ketiga, masalah lain berada di luar institusi TNI, yakni lemahnya kapasitas politik sipil dalam hal kaderisasi internal partai. Frustrasi politik dalam mencetak kader yang berkualitas, selalu membuat partai masih mencari-cari figur dari militer yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dalam hal ini figur militer selalu difasilitasi dan ditarik-tarik oleh partai untuk masuk dalam kontestasi politik. Peluang ini jelas disambut baik oleh para figur militer yang memang kebetulan punya ambisi politik namun peluang politiknya tertutup oleh proses reformasi TNI yang memangkas tradisi politik TNI. Secara institusi TNI juga tidak bisa berbuat banyak, karena peluang itu sah dan dibenarkan oleh regulasi yang ada. Majunya calon berlatar belakang militer bisa dilihat dari banyaknya purnawirawan Jenderal yang berminat untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan presiden 2009 maupun yang ikut dalam pengurus partai politik. (Kompas, edisi 5 Februari 2004: 7)

Konsep kemandangalan yang disalah artikan. “*Historical fallacies* (kesalahan sejarah) telah menumbuhkan persepsi yang salah, bahwa fakta sejarah harus diperlakukan sebagai hak sejarah. Sekalipun barangkali fakta sejarah menunjukkan, TNI adalah anak kandung revolusi dan tak terpisahkan dari rakyat, sehingga menyandang peran ganda – sebagai militer profesional sekaligus sebagai kekuatan sosial politik – fakta tersebut tidak bisa dengan sendirinya menjadi hak.

Konsep kemandirian rakyat dengan TNI pada masa Orde Baru melegitimasi peran sosial politik TNI. Kini zaman sedang berubah, landasan historis TNI seharusnya bisa lebih dinamis, konsep pertahanan modern dengan melibatkan rakyat dalam definisi konvensional adalah paradigma usang. Perlu digagas hubungan sipil militer, jarak, tugas dan tanggungjawab yang jelas. TNI dan masyarakat sipil di negara demokrasi tidaklah berada pada posisi sejajar, tapi masyarakat sipil adalah pemegang kedaulatan tertinggi, termasuk supremasi terhadap militer melalui mekanisme politik yang ada. Persoalan paradigmatis ini kemudian berujung pada kekeliruan doktrin pada level operasional (doktrin pelaksanaan) yang dikenal sebagai doktrin Tri Dharma Eka Karya/Tridek (pengganti doktrin Catur Dharma Eka Karya/Cadek). Paradigma lama tanpa usaha melakukan redefinisi terhadap konsep kemandirian TNI dengan rakyat menjadikan pertahanan Indonesia masih mengandalkan unsur masyarakat sipil dalam konsep perang rakyat semesta-nya. Militer pada posisi yang sebenarnya bila ditandai dengan beberapa karakter: Pertama, militer mempunyai orientasi profesional yakni tidak cenderung melakukan intervensi dan dominasi dalam kehidupan politik; Kedua, militer hanya menjalankan fungsi pertahanan-kemanan; ketiga, secara institusional militer bertindak sebagai lembaga yang bertugas sebagai aparat negara, bukan sebagai komponen pemerintahan; keempat, militer sebagai lembaga yang didukung oleh pemerintah mengembangkan militerisasi dalam pengertian build-up, yakni membangun industri militer untuk kepentingan pertahanan-keamanan; kelima, ideologi militerisme ke dalam wilayah kehidupan masyarakat relatif terbatas; keenam, militer berada dalam posisi subordinat yang

tunduk pada supremasi sipil dalam pemerintahan; ketujuh, derajat kontestasi militer atau keterlibatan dalam pembuatan keputusan nasional sangat terbatas dalam bidang pertahanan-keamanan dan kebijakan luar negeri; kedelapan, hak-hak istimewa militer dalam menggunakan kekuatan senjata (perang) sangat terbatas, dibawah kontrol sipil; kesembilan, kekuatan sipil, baik masyarakat sipil maupun masyarakat politik, dalam posisi dominan yang mengontrol sepak-terjang militer (Kontras, 2004: 54).

Militer sangat mendominasi perpolitikan Indonesia pada masa orde baru dengan menempati posisi strategis pemerintahan pusat ataupun daerah. Militer juga mendominasi struktur Golkar sampai dengan Munaslub 1998 serta mendapat perlakuan istimewa dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang fluktuatif, militer mendapatkan jatah melalui mekanisme pengangkatan. Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak, khususnya terkait tersumbatnya peluang demokrasi atau sebaliknya Indonesia menjadi rezim otoriter serta menurunkan profesionalisme militer, ini bisa dirasakan sampai saat ini, dimana Indonesia memiliki kompetensi tempur prajurit yang rendah dan sistem pertahanan yang lemah. Lemahnya sistem pertahanan menjadi salah satu faktor melemahnya posisi Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara tetangga. Faktor penyebab dominasi militer dalam perpolitikan Indonesia disebabkan 2 faktor yakni faktor internal; hasrat kekuasaan para perwira termasuk didalam upaya Soeharto mempertahankan kekuasaan, memperjuangkan kepentingan militer khususnya terkait dana serta kesalahan memahami konsep stabilitas sebagai prasyarat pembangunan. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan kegagalan

pemerintahan orde lama.(instabilitas politik, pemberontakan didaerah dan krisis ekonomi).

2.1.7 Profil Calon Gubernur Sumatera Utara dari TNI



Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang lahir di kota Sabang, Aceh pada 10 Maret 1961 adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/593/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 ditugaskan menjadi Pangkostrad menggantikan Jenderal TNI Mulyono yang telah menjadi KSAD.

Ia adalah lulusan SMA 1 Medan tahun 1979 dan Akademi Militer tahun 1985 berpengalaman dalam bidang infanteri. Jabatan sebelumnya adalah Panglima Kodam I/Bukit Barisan. Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi anak dari Alm. Kapten TNI Rachman Ishaq, penduduk asli Kota Medan bersuku Melayu Deli. Edy Rahmayadi pernah menjabat sebagai Komandan Yonif Linud 100/Prajurit Setia yang bermarkas di Namu Sira-Sira, Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Edy Rahmayadi perwira tinggi dengan jabatan terakhir sebagai Pangkostrad, pensiun dini ditengah puncak karir yang terus meningkat, untuk mengabdikan membangun kampung halaman, Sumatera Utara.

Sebelum meraih jabatan pada satuan elit ini, Edy bertugas di Sumut sebagai Komandan Linud 100 Binjai dan Panglima Kodam BB. Selebihnya mengabdikan di beberapa daerah di Indonesia. Setelah itu, ia ditarik kembali ke Kostrad dengan menjadi Panglima Divisi Infanteri Kostrad pada tahun 2014.

Kariernya pun terus naik. Tak lama kemudian, pada 2015, ia mendapat tugas sebagai Panglima Kodam I/Bukit Barisan. Pada tahun yang sama, ia juga diminta kembali ke satuan Kostrad, namun kali ini ditunjuk sebagai orang nomor satu sebagai Panglima Kostrad.

Di tengah jabatan-jabatan strategisnya, Edy saat menjadi Pangdam Bukit Barisan terpanggil hanya untuk membangkitkan kembali persepak-bolaan tanah air yang saat itu sedang mengalami kevakuman karena konflik Menpora dengan PSSI yang menyebabkan pembekuan kegiatan sepakbola.

Pada saat itulah, Edy terjun langsung dalam usaha untuk membangkitkan PSMS hingga klub tersebut menjuarai Piala Kemerdekaan 2015. Perjuangan Edy untuk memajukan PSMS Medan belum berhenti. Ia juga mengusahakan agar klub itu dapat mengikuti Piala Jenderal Sudirman meski awalnya sempat mendapat penolakan.

Di dunia sepak bola, sosok Edy memang tak terlalu menonjol. Perlahan nama Edy Rahmayadi pun mencuat ke permukaan persepakbolaan Indonesia setelah kelompok K-85 yang merupakan kumpulan dari 85 klub pemilik suara dalam kongres PSSI yang mencalonkan Eddy sebagai Ketua Umum PSSI. Pada pemilihan Ketua Umum PSSI yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada 10 November 2016, Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum.

Sejalan dengan terus melonjaknya karir Edy Rahmayadi, Jendral Bintang ga ini ingin kembali membenahi kampung halamannya SUMATERA UTARA yang sudah jauh teringgal di berbagai Aspek, terlebih masalah kepemimpinan dan keamanan.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi menyatakan siap meramaikan Pilkada serentak 2018 mendatang. Ia siap bertarung memperebutkan kursi Sumatera Utara 1.

Beliau punya misi besar jika sukses memenangkan Pilgub Sumut. Keamanan dan keterban masyarakat jadi prioritasnya."Pertama adalah keamanan. Yang membuat orang Sumut tidak nyaman karena tidak aman, banyak sekali hal-nya. Itu yang akan kita luruskan nan, ada kegiatan yang bersifat kelompok premanisme ataupun kasus begal ini harus kita selesaikan," kata Edy Rahmayadi

A. Pendidikan Militer

- Akabri (1985)
- Sussarcab Inf (1985)
- Selapa/Inf. (1992)
- Selapa II/Inf (1995)
- Seskoad (1998)
- Lemhannas (2011)

B. Riwayat Jabatan

Letnan Dua s/d Kapten

- Danton di jajaran Kopassus (1985)
- Danton Kostrad (1985)
- Danton Yonif 321/Galuh Taruna Kostrad (1985)
- Danton Yonif 323/Buaya Putih Kostrad (1986)
- Danton Yonif 2/A 323/Buaya Putih Kostrad (1987)
- Danton I/B Yonif 323/Buaya Putih Kostrad (1988)

- Dankipan B Yonif 323/Buaya Putih Kostrad (1989)
- Dankipan A Yonif 323/Buaya Putih Kostrad (1993)

Mayor

- Kasi Ops dan Org Bagnis (1995)
- Ps. Pbdy Lat Kodam I/Bukit Barisan (1998)
- Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 100/Prajurit Setia, Kodam I/Bukit Barisan (1998)
- Kasi Ops Rem 031/Wirabraja, Kodam I/Bukit Barisan (2001)
- Kasi Ops Rem 011/Lilawangsa, Kodam Iskandar Muda (2001)

Letnan Kolonel

- Komandan Kodim 0316/Batam, Kodam I/Bukit Barisan (2002)
- Kepala Staf Korem 031/Wirabraja, Kodam I/Bukit Barisan (2004)
- Pabandya-3/Banglarsat, Paban III/Binorg, Sopsad (2006)
- Dosen Gol. IV Seskoad (2007)
- Patun Seskoad (2007)

Kolonel

- Asops Kasdam Iskandar Muda (2008)
- Komandan Resimen Taruna Akademi Militer (2010)
- Pamen Denma Mabesad (2011)

Brigadir Jenderal

- Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Kodam XVII/Cendrawasih (2012)

- Dir Pemantapan Semangat Bela Negara, Deputi Bidang Pemantapan Nilai Kebangsaan, LEMHANAS RI (2013)

Mayor Jenderal

- Panglima Divisi Infanteri I Kostrad (2014)
- Panglima Kodam I/Bukit Barisan (2015)

Letnan Jenderal

- Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (2015-2018)
- Ketua PSSI (2016 - 2020)

C. Penghargaan

- Bintang Dharma
- Bintang Yudha Dharma Pratama
- Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
- Bintang Yudha Dharma Nararya
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- SL. Dharma Bantala
- SL. Kesetiaan VIII, XVI, XXIV
- SL. Dwidya Sistha
- SL. GOM IX
- SL. Dharma Nusa
- SL. Wira Karya

D. Keluarga

Istri Nawal Lubis

(sumber:Ibu Devi Sherly Staff pribadi Letjen (Purn) T.Edi Rahmayadi).

2.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Gaya Komunikasi Politik; Komunikasi verbal dan non verbal. (Afib, 2011: 47-49).
2. Komunikasi Efektif:
 - a. Keterbukaan,
 - b. Empati,
 - c. Perilaku suportif,
 - d. Perilaku positif,
 - e. Kesamaan (Devito dalam Budianto dan Hamid, 2011: 317-324)
3. Persepsi:
 - a. *Gathering*;
 - b. *Selecting*;
 - c. *Mixing*;
 - d. *Organizing*;
 - e. *Interpreting*; (Robert G. King dalam Yuniati, 2002: 84).



Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan Tentang Calon Gubernur Dari TNI
(Edy Rahmayadi)

2.3. Kajian penelitian yang relevan

Kajian penelitian yang dipaparkan peneliti mengenai penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian dilakukan oleh Novrianto tahun 2015 dari Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru Jurusan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Organisasi Kemasyarakatan PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru”**.

Rumusan masalah penelitian Apa saja aktifitas-aktifitas PAC Pemuda Pancasila di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dan Bagaimana persepsi masyarakat terhadap PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Limapuluh?.

1. Untuk mengetahui peranan Pemuda Pancasila dimasyarakat, serta aksi-aksi premanisme yang dilakukan Pemuda Pancasila di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan masyarakat terhadap organisasi masyarakat pemuda pancasila di Kecamatan Limapuluh.

Metode penelitian menggunakan kualitatif karena ini mengetahui dan menggali secara lebih detail berdasarkan hasil wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap organisasi masyarakat PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru, Pemuda Pancasila harus siap menerima perubahan dan harus bisa melakukan perubahan didalam diri mereka sendiri, yang awal mulanya Pemuda Pancasila selalu melakukan tindakannya dengan cara represif yang mengutamakan kekuatan fisik, agar harus dirubah dengan mengutamakan pola fikir, ide-ide dan strategi untuk memberikan banyak manfaat didalam kehidupan bagi masyarakat. Dengan adanya perubahan ini diharapkan Pemuda Pancasila dapat menghilangkan citra negatif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Diharapkan kepada pengurus Pemuda Pancasila untuk lebih memperhatikan kinerja dan aktifitas yang dilakukan oleh anggota-anggota Pemuda Pancasila dilapangan. Pemuda Pancasila harus benar-benar mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu organisasi masyarakat, dengan ini maka keberadaan organisasi Pemuda

Pancasila dapat diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Diharapkan Pihak Pemerintah dan Pemuda Pancasila dapat bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini agar masyarakat yang bertempat tinggal didaerah ini merasa diperhatikan dan merasa nyaman tinggal di tinggal di Kecamatan Limapuluh. Supaya masyarakat juga dapat terus bertahan untuk tinggal dan tidak memilih pindah dari daerah ini.

Kemudia penelitian dilakukan oleh Rahayu Purwatiningsih tahun 2008 dari Universitas Sebelas Marer Surakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Puskesmas (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi masyarakat mengenai peranan Puskesmas Jatinom dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kelurahan Krajan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)”**

Rumusan masalah penelitian pelayanan yang ada di Puskesmas tidak dimanfaatkan sebagai alternatif untuk mendidik masyarakat. Pendidikan kesehatan juga harus mendapatkan tempat dalam kegiatan rutin puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan memiliki akses terhadap informasi, masyarakat akan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan kesehatan dengan menuntut perbaikan ketika di perlukan.

Oleh karena itu, apabila kita menginginkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka kita harus bersedia dan mampu mengubah perilaku masyarakat. Dalam bidang kesehatan, tugas ini merupakan tugas dari tenaga kesehatan yang berada di puskesmas sebagai pendidik atau penyuluh kesehatan (health educator).

Adapun peran dan fungsi pokok dari Puskesmas adalah :

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menggali data-data dari lapangan, yaitu melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi yang di dapat dari hasil wawancara. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data yaitu merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi mencerminkan suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pengambilan sampel penelitian ini adalah melalui purposive sampling yaitu pemilihan secara sengaja dengan maksud menemukan apa yang sesuai dengan tujuan penelitian dan jumlah sampel yaitu sepuluh orang informan yaitu lima orang oleh pasien rawat jalan dan rawat inap, sedangkan lima orang untuk Dokter, Bidan, Perawat dan staf pegawai di Puskesmas Jatinom.

Keberadaan Puskesmas Jatinom yang berada di pusat kecamatan sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi fisik serta saran dan prasarana yang membantu saat ini bisa dikatakan sudah cukup lengkap dan modern. Kebersihan dan kenyamanan ruangan-ruangan di Puskesmas Jatinom

sangat terjaga dan baik. Kelengkapan prosedur, aturan serta informasi-informasi lain juga sangat lengkap dan jelas.

Pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas bisa dikatakan cukup mudah, cepat dan nyaman karena penampilan fisik petugas enak dilihat dan sikap mereka yang sangat ramah, sabar dan komunikatif. Dokter dan perawat selalu bertindak dengan tepat dan cepat. Pasien juga diberi kesempatan untuk bertanya dan sebaliknya petugas mesti menjawab dengan baik.

Biaya yang dibebankan oleh pihak Puskesmas Jatinom sangat terjangkau bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pelayanan yang diberikan pun sudah sangat lebih dari biaya yang dibebankan. Intensitas pasien untuk berobat ke Puskesmas Jatinom terjadi secara kontinyu karena kemampuan pengobatannya tidak perlu diragukan. Keberadaan Puskesmas Jatinom ternyata sangat membantu pemeliharaan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat kecamatan Jatinom. Masyarakat tidak perlu khawatir akan terbebani dengan biaya yang tinggi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Persepsi masyarakat Jatinom terhadap Puskesmas Jatinom sangat positif. Stigma negatif akan pelayanan buruk puskesmas sedikit demi sedikit mulai terhapus dengan sendirinya. Hanya saja, terjadi kekurangan SDM di Puskesmas Jatinom yaitu dokter laki-laki, perawat dan asisten perawat. Tapi meskipun di tubuh puskesmas terjadi masalah, dimata masyarakat pelayanan yang diberikan sudah optimal. Pihak puskesmas berharap akan mendapat tambahan SDM dari pemerintah agar kinerjanya bisa jauh lebih maksimal lagi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif fenomenologi dengan focus kajian mengenai **Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan Tentang Calon Gubernur Berlatar Belakang Dari TNI Pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.**

3.1.1. Penelitian deskriptif kualitatif fenomenologi

Menurut Sugiyono (2013: 1) penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Peneliti merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan maka dapat dikatakan semakin baik pula kualitas penelitian. Namun dari segi jumlah responden atau objek penelitian, kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibanding kuantitatif karena lebih mengedepankan kedalaman data bukan kuantitas data.

Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan.

Penulis memilih penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail dan menginterpretasikan data atau gejala yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Jenis penelitian ini juga dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yang menurut penulis lebih tepat dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga penulis dapat menyimpulkan dengan detail bagaimana **Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan Tentang Calon Gubernur Berlatar Belakang Dari TNI Pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018**.

Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif. Data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data dilaksanakan secara teliti (Sutopo, 20006:241).

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi. Penelitian ini sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan keadaan atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998:231).

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi

kunci terhadap apa yang telah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2002 : 11).

Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi *penelitian kualitatif* yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan *hermeneutics* yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "*apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian*" (Moleong, Lexy J, Dr : 1998).

Fokus pendekatan fenomenologi adalah pengalaman yang dialami oleh individu. Bagaimana individu memaknai pengalamannya tersebut berkaitan dengan fenomena tertentu yang sangat berarti bagi individu yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif fenomenologi. Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai **Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan Tentang Calon**

Gubernur Berlatar Belakang Dari TNI Pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

3.1.2. Analisis tematik

Penulis menggunakan Analisis tematik mengidentifikasi tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena. Tema-tema ini dapat diidentifikasi, dikodekan secara induktif (*data driven*) dari data kualitatif mentah (transkrip wawancara, biografi, rekaman suara, video, dan sebagainya) maupun secara deduktif (*theory driven*) berdasarkan teori maupun hasil penelitian terdahulu (Boyatzis, 1998).

Penggunaan masing-masing teknik secara khusus akan berbeda, tergantung dari tujuan penelitian. Namun demikian penelitian ini mencoba menerapkan kedua langkah analisis tematik tersebut dalam mengkaji 1 kasus tentang persepsi tokoh masyarakat kota Medan tentang calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862).

Adapun narasumber penelitian dalam tulisan ini, adalah Tokoh-tokoh Masyarakat Kota Medan :

1. Tokoh Perempuan
2. Mantan Walikota Medan

3. Tokoh Agama
4. Tokoh Politik
5. Pengamat Politik
6. Pengamat Sosial dan budaya
7. Tokoh kepemudaan
8. Aktivistis Muda Islam
9. Akademisi
10. Aktivistis Perempuan
11. Pengusaha
12. Aktivistis 1998
13. Anggota DPRD
14. Tokoh Suku Melayu
15. Tokoh Suku Minang
16. Tokoh Suku Mandailing
17. Tokoh Suku Batak
18. Tokoh Suku Jawa

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989: 622). Menurut (Supranto, J. 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini

Calon Gubernur Sumatera Utara dari TNI yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn.) Edy Rahmayadi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai obyek dan informasi adalah suatu subyek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data.

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat

diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, di dokumentasikan dan sebagainya.

Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa transkrip wawancara, pedoman wawancara, camera photo, video dan lainnya.

3.3.1 Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Supardi, 2006 : 99).

Dalam buku kualitatif (Moloeng, 2005) mengemukakan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu wawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan orang yang akan diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2005 : 186).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya, untuk merekonstruksikan beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman

masa lampau dan memproyeksikan hal-hal yang dikaitkan dengan harapan yang bias terjadi dimasa yang akan datang (Sutopo, 2006 : 68).

Wawancara percakapan informal (*the informal conversational interview*) menunjuk pada kecenderungan sifat sangat terbuka dan sangat longgar (tidak terstruktur) sehingga wawancara memang benar-benar mirip dengan percakapan. Pertanyaan yang subjek lain; subjek yang sama kadang kala harus didatangi oleh peneliti untuk pertanyaan yang berbeda atau mirip sehingga jawaban terdahulu mungkin dapat ditambahkan atau di revisi oleh subjek (Pawito, 2007:132-133).

Wawancara harus diperoleh dalam waktu yang sangat singkat serta bahasa yang digunakan harus jelas dan teratur.

Pada penelitian ini akan digunakan teknik wawancara yang menggunakan petunjuk umum wawancara, dimana sebelum bertemu dengan informan, peneliti akan mempersiapkan berbagai hal yang akan ditanyakan sehingga berbagai hal yang ingin diketahui dapat lebih terfokus.

3.3.1.1 Jenis- jenis wawancara

1. Wawancara Tertutup

Wawancara tertutup adalah sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi inisial nama narasumber. Wawancara tertutup ini bisa juga diartikan sebagai wawancara yang pertanyaan – pertanyaannya terbatas dan telah

tersedia jawabannya yang berupa pilihan. Contohnya adalah wawancara yang menggunakan lembar questionnaire.

2. Wawancara terbuka

Wawancara ini bertolak belakang dengan jenis wawancara tertutup, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan – pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Contohnya adalah wawancara yang meminta narasumber untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai suatu hal.

3. Wawancara konferensi

Wawancara konferensi adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan di acara – acara televisi atau talk show, wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada sejumlah narasumber di acara formal atau diskusi publik, dan Wawancara jarak jauh (teleconference) yang banyak dilakukan di acara – acara berita.

4. Wawancara Kelompok

Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini hampir sama dengan wawancara konferensi, tetapi pada wawancara kelompok pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh setiap pewawancara berbeda – beda. Contohnya adalah wawancara kepada seorang artis, pejabat, atau group band yang berprestasi atau sedang terkena skandal.

5. Wawancara Individual

Wawancara Individual adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang wawancara dengan seorang narasumber. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara perorangan. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan oleh wartawan dalam mencari berita.

6. Wawancara Terpimpin

Wawancara ini disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya baik oleh pewawancara maupun narasumbernya. Contohnya adalah wawancara yang sering terjadi di acara – acara talk show bertemakan khusus kepada narasumber seperti dokter, polisi, guru, dan lain – lain.

7. Wawancara Bebas

Wawancara bebas adalah jenis wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain wawancara ini terjadi spontan bergantung dengan suasana dan keadaan ketika kegiatan wawancara berlangsung. Wawancara ini sering disebut juga dengan wawancara tidak berstruktur. *(diakses pada tgl 25 April 2018 dari <http://www.gurupendidikan.co.id/8-jenis-bentuk-dan-pengertian-wawancara-menurut-para-ahli-beserta-contohnya/>).*

3.3.1.2. Metode wawancara

Untuk mendapatkan informasi, ada beberapa metode yang digunakan oleh pewawancara ketika mengadakan wawancara.

1. Mencatat

Metode yang pertama adalah mencatat. Para pewawancara biasanya menyiapkan buku dan pulpen untuk mencatat jawaban – jawaban dari narasumber. Ketika mencatat jawaban tersebut, pewawancara akan menuliskannya dengan sangat cepat dengan cara hanya menuliskan point – pointnya saja. Karena kalau tidak, mereka tidak akan mendapat informasi yang telah diutarakan oleh narasumbernya. Setelah mendapatkan catatan hasil wawancara, barulah catatan itu dikembangkan dengan menggunakan tulisan yang baik dan informative.

2. Merekam / Recording

Metode selanjutnya adalah merekam. Pewawancara membutuhkan suatu alat yang berupa perekam suara. Alat ini digunakan untuk merekam jawaban – jawaban yang diberikan oleh narasumber, sehingga mereka tidak akan kehilangan informasi sedikitpun. Setelah mendapatkan rekaman, pewawancara akan menulis transkrip tanya jawab tersebut dan menjadikannya sebuah tulisan berita. *(diakses pada tgl 25 April 2018 dari <http://www.gurupendidikan.co.id/8-jenis-bentuk-dan-pengertian-wawancara-menurut-para-ahli-beserta-contohnya/>).*

Penelitian ini menggunakan Jenis **Wawancara Individual** dengan metode **mencatat** dan **merekam/recording** kepada para Tokoh Masyarakat Kota Medan.

3.4. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan yang dilakukan, untuk memproses atau objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui terlebih dahulu, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan dengan investigasi.

Observasi adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam penelitian, berupa sebuah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan memahami dan merasakan pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Secara etimologi observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “melihat dan memperhatikan”. Terdapat beberapa para ahli yang berpendapat mengenai pengertian dari observasi, masing-masing pendapat dari ahli tersebut memiliki perbedaan tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi non partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur (Sugioyono : 2009).

1. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

2. Observasi Non Partisipan (Non Participant Observation) Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat aktif dan hanya sebagai pengamat independen.
 3. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Penulis menggunakan Observasi non partisipasi (*non participant observation*) karena proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.

3.5. Teknik Validasi Data

Berbicara tentang pengertian validitas, banyak pakar memberikan definisi yang beragam. Di antaranya adalah Fraenkel, ia menuturkan bahwa validitas menunjukkan kesamaan, pengertian maupun penggunaan masing-masing peneliti yang berbeda dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Sugiyono, validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Selanjutnya, Donald Ary, dkk., mengatakan bahwa validitas menunjuk kepada sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Data yang telah berhasil dilapangan studi dikumpulkan dan dicatat dalam penelitian. Harus diusahakan bukan hanya untuk kedalaman dan kemantapannya tetapi juga bagi kemantapan dan kebenarannya. Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif (Sutopo, 2006:92).

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Sebagaimana diketahui dalam penelitian kualitatif peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Karena itu, kualitas penelitian kualitatif sangat tergantung pada kualitas diri penelitinya, termasuk pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat berharga. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan penelitian, semakin peka memahami gejala atau fenomena yang diteliti. Namun demikian, sebagai manusia, seorang peneliti sulit terhindar dari bias atau subjektivitas. Karena itu, tugas peneliti mengurangi semaksimal mungkin bias yang terjadi agar diperoleh kebenaran utuh. Pada titik ini

para penganut kaum positivis meragukan tingkat ke'ilmiah'an penelitian kualitatif. Malah ada yang secara ekstrim menganggap penelitian kualitatif tidak ilmiah.

Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan untuk menjelaskan (*to explain*) hubungan antar-variabel atau membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu. Kedalaman pemahaman akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan berbagai perspektif digunakan untuk memotret sesuatu fokus masalah secara komprehensif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data (sering juga disebut sebagai triangulasi sumber), yakni cara membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Darui sini, peneliti akan sampai pada salah satu kemungkinan data yang diperoleh ternyata konsisten atau berlawanan. Dengan cara ini peneliti kemudian dapat mengungkapkan gejala yang di teliti (Pawito, 2007:99).

Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, kendati pasti menambah waktu dan biaya serta tenaga. Tetapi harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai

fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan untuk menjelaskan (*to explain*) hubungan antar-variabel atau membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu. Kedalaman pemahaman akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan berbagai perspektif digunakan untuk memotret sesuatu fokus masalah secara komprehensif. Karena itu, memahami dan menjelaskan jelas merupakan dua wilayah yang jauh berbeda

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data dalam penelitian Kualitatif, setelah berbagai data terkumpul berdasarkan teknik pengumpulan data sebelumnya, peneliti kualitatif, akhirnya harus mampu melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif, harus bersipat deskriptif namun penuh analitis. Baik buruknya sebuah penelitian kualitatif, akan sangat tergantung pada bagaimana data tersajikan dengan benar. Bagaimana pula kesan seorang peneliti menangkap sebuah data.

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong 2002:24), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting ada apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer , dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi , maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

b. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data.

Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narrative tex*” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di kota Medan tempat tinggal tokoh masyarakat kota Medan.

3.7.2. Waktu Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami kapan penelitian ini akan dilakukan, berikut jadwal penelitian :

Kegiatan	Bulan																								
	Desember 2017					Januari 2018					Februari 2018					Maret 2018					April 2018				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Persiapan Penelitian					■																				
Pembuatan Proposal						■	■	■	■	■															
Seminar Proposal											■														
Penelitian Lapangan												■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Pengolahan data dan bimbingan																					■	■	■	■	■

Kegiatan	Bulan																								
	Mei 2018					Juni 2018					Juli 2018					Agustus 2018					September 2018				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Seminar hasil				■																					
Perbaikan seminar hasil						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Tesis																									
Perbaikan Tesis dan cetak tesis																■	■	■	■	■					

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisa Persepsi tokoh masyarakat kota Medan, peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara Tokoh Masyarakat di Kota Medan, khususnya di tokoh dari kalangan Muslim. Wawancara dilaksanakan dengan cara mendatangi secara langsung kepada Tokoh Masyarakat Kota Medan tersebut.

4.1.1 Biodata Narasumber dan hasil wawancara

4.1.1.1 Narasumber Prof. Hj. Lusiana Adriani Lubis, MA.,Ph.D

a. Biodata Narasumber



1. Nama : Prof. Hj. Lusiana Adriani Lubis, MA.,Ph.D
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 5 April 1967
3. Agama : ISLAM
4. Pangkat Terakhir : Guru Besar

5. Pendidikan Terakhir : Doktor (S3)
6. Unit Kerja : Dosen USU
7. Jabatan : Ketua Magister Ilmu Komunikasi FISIP USU
8. Suami : drg. H. Iqbal Siregar

Riwayat Pendidikan

No	Uraian	Jurusan	Tempat	Tahun Lulus
1	Doktoral (S3)	Ilmu Komunikasi	Universiti Sains Malaysia	2011
2	Magister (S2)	Ilmu Komunikasi	Universiti Sains Malaysia	1999
3	Sarjana (S1)	Ilmu Komunikasi	FISIP USU	1989
4	SMA			
5	SMP	-		
6	SD	-		

Karya yang sudah di publish :

No	Judul	Tahun
1	Komunikasi Budaya dan Jurnalisme Warga	2012
2	Persepsi Budaya dalam Sorotan Komunikasi Lintas Budaya	2011
3	Komunikasi Budaya dan Kekuasaan	2011

b. Hasil wawancara

Tanya : Persepsi Ibu tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru

Jawab : Militer di orde baru memang agak otoriter, tapi otoriter banyak segi positifnya yaitu pertahanan dan keamanan. Lihat sekarang Narkoba sangat bebas masuk ke wilayah NKRI. Kepemimpinan Militer di zaman orde baru atau di masa pak Harto, dilihat dari wilayah kita yang begitu luas kepemimpinan Militer di zaman orde baru atau di

masa pak Harto sangat baik, karena militer menguasai dan mengetahui teritorial wilayah NKRI.

Tanya : Persepsi ibu tentang militer pada era reformasi

Jawab : Militer di era reformasi cukup baik karena mereka tidak berpolitik dan kembali tugas utamanya pertahanan dan keamanan.

Tanya : Persepsi ibu tentang kepemimpinan Gubernur sumut berlatar belakang dari militer di era reformasi

Jawab : Pak Tengku Rizal Nurdin dekat dengan masyarakat Sumatera Utara dan masa beliau memimpin Sumatera Utara walaupun tidak bisa dibilang aman dan terkendali di awal Reformasi kepemimpinan beliau karena kita sedang mengalami krisis moneter yang berkepanjangan.

Tanya : Persepsi ibu tentang kepemimpinan Gubernur sumut dari sipil di era reformasi

Jawab : Kepemimpinan Bapak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho biasa-biasa saja tidak ada sesuatu yang istimewa yang dilakukan beliau untuk Sumatera Utara malahan membangun citra negative karena menjadi tahanan kasus korupsi. Pak Syamsul dekat dengan masyarakat dan pak gatot dekat dengan ummat Islam.

Tanya : Apakah Ibu tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Saya kurang begitu mengenal bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi nampaknya beliau baik.

Tanya : Menurut Ibu apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.

Jawab : Sangat layak karena masyarakat Sumatera Utara rindu pemimpin yang tegas dan mempunyai visi misi membangun Sumatera Utara lebih baik.

Tanya : Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Jawab : Sebagai seorang Tentara beliau sangat menyakinkan, tegas, berwibawa.

Tanya : Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Tegas dan berwibawa, bahasa nya mudah dipahami.

Tanya : Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Saya tidak mengenal keluarga beliau

4.1.1.2 Narasumber Drs Shohibul Anshor Siregar Msi

a. Biodata Narasumber



1. Nama : **Drs Shohibul Anshor Siregar Msi**
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tarutung 14 Maret 1958
3. Agama : ISLAM
4. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)
5. Unit Kerja : Dosen UMSU
6. Jabatan : -
7. Suami : Dra. Rosnadana

Pendidikan

1. SDN dan SD Muhammadiyah Sibulan-bulan Taput
2. PGA 4 Tahun Peanornor (1974)
3. PGA 6 Tahun Padangsidempuan (1976)
4. FISIP UMSU (1985)
5. PPs Sosiologi Universitas Gadjah Mada (1995)

Karir

1. Kepala Biro Umum UMSU
2. Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU
3. Kepala Biro Kemahasiswaan UMSU
4. Kepala Litbang UMSU
5. Direktur Growth Centre Kopertis I NAD-Sumut (1996 – 1999)
6. Staf Ahli Rektor UMSU
7. Staf Ahli DPRD Sumut (1999-2009)
8. Staf Ahli Kajati Sumut bidang Sosial dan Politik (2002-2003)
9. Direktur 'nBasis

Organisasi Muhammadiyah

1. Ketua DPD IMM Sumut (1986-1988)
2. WaSek Majelis Dikdasmen PWM Sumut
3. Sekretaris Majelis Pustaka dan Ketua Badan Litbang PWM Sumut
4. Majelis Hikmah (bidang Politik) PWM Sumut
5. Sekum Forum Komunikasi Alumni (FOKAL) IMM Sumut.

b. Hasil wawancara

Tanya : Persepsi bapak tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru

Jawab : Orde baru muncullah upaya-upaya untuk menonjolkan peran militer dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Ada 3 unsur penting yang menopang kekuasaan : Gagasan untuk membuat stabilitas, harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan implusif, membuat

perbandingan dengan zaman sebelumnya. Dari situ lah terjadi penyederhanaan partai.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan militer pada era reformasi

Jawab : Dinamika politik era Reformasi, menjungkirbalikkan kekuatan politik militer dalam konstelasi politik nasional. perlahan militer mulai disisihkan hak politiknya dan dikembalikan kepada ranah sejatinya sebagai alat pertahanan negara.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur sumut berlatar belakang dari militer di era reformasi

Jawab : Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin adalah jembatan antara orde baru dan era reformasi. Karya Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin tidak banyak hanya konsolidasi itu tdak tahu mau dibuat apa. Karena beliau memimpin di awal Reformasi. Konsolidasi itu membuat energinya habis sehingga tidak terlihat apa yang dilaksanakannya.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur sumut dari sipil di era reformasi

Jawab : Otonomi daerah membuat banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Saya menolak Gubernur Sumatera Utara terlihat kasus korupsi, apakah masuk di akal besaran APBD Sumatera Utara pada urutan ke 13 menjadi kan pimpinan propinsi ini menjadi koruptor

sementara daerah yang ber APBD besar tidak tersangkut kasus korupsi. Kepemimpinan Bapak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho terlalu singkat sehingga kita tidak bisa mempersepsi kan kepemimpinan beliau.

Tanya : Apakah Bapak tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Siapa yang tak mengenal bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi saat ini.

Tanya : Menurut Bapak apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.

Jawab : Sangat layak di pilih. Masyarakat Sumatera Utara berharap ada kewibawaan dan kepemimpinan yang kuat dan itu ada di Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi.

Tanya : Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Jawab : Penampilan fisik beliau gagah dan sehat.

Tanya : Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Gaya komunikasi Letjen (Purn) T.Edi Rahmayadi singkat, padat dan tepat. Tegas, terukur dan akan lebih instruktur.

Tanya : Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Keluarga istrinya merupakan warga asli kota Medan bermarga Lubis, anak laki-laki sekolah di SMA Negeri 1 Medan dan ada juga anaknya kuliah di FK-UMSU.

4.1.1.3 Narasumber H. ZULHAM EFENDI SIREGAR, ST

a. Biodata Narasumber



1. Nama : **H. ZULHAM EFENDI SIREGAR, ST**
2. NIP : 19791220 20031 2 1 004
3. Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 20 Desember 1979
4. d. Agama : ISLAM
5. Pangkat Terakhir : Penata TK. I (III/d)
6. Pendidikan Terakhir : Sarjana Teknik Informatika (S1)
7. Masa Kerja : 14 Tahun 03 Bulan
8. Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Pemuda
9. Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera
Utara

Riwayat Pendidikan Umum

NO	URAIAN	JURUSAN	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	Pasca Sarjana	Magister Hukum	Panca Budi – Medan	
2	Sarjana	Teknik	Harapan Medan	2003
3	SMU	-	Al Washliyah Medan	1998
4	SMP	-	Negeri 27 Medan	1995
5	SD	-	Negeri 060853 Medan	1992

Riwayat Organisasi

NO	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Harapan Otomotif Indonesia	Pendiri/Ketua Umum	2000-2005
2	DEPICAB WKI Medan	Ketua	2007-2012
3	DPD KNPI Kota Medan	Ketua	2009-2012
4	GP AL WASHLIYAH PROVSU	Wakil Ketua	2012-2017
5	PW MHKI PROVSU	Sekretaris	2016-2019
6	PD HIKMA Kota Medan	Penasehat	2016-2020
7	Asosiasi Futsal Kota Medan	Wakil Ketua	2016-2020

b. Hasil wawancara

Tanya : Persepsi bapak tentang militer dan kepemimpinanya di orde baru

Jawab : Ada gerakan-gerakan yang ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ada penempatan yang luar biasa dari Militer di daerah-daerah konflik tujuannya supaya NKRI tidak terpecah belah. Pergerakan mahasiswa dan politik diawasi. Tetapi ekonomi dan keamanan stabil.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan militer pada era reformasi

Jawab : Masa era reformasi semakin maju sehingga pejabat atau pemimpin tidak dapat menutup diri terhadap kinerjanya karena masyarakat mengawasi mereka. Militer di era reformasi sudah sangat baik sesuai dengan tuntutan reformasi menghapus dwi fungsi ABRI.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang dari militer di era reformasi

Jawab : Kepemimpinan bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin baik karena pada saat beliau memimpin Indonesia dalam masa transisi dari orde baru ke era reformasi. Stabilitas nasional kurang baik sehingga, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan krisis kepercayaan.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut dari sipil di era reformasi

Jawab : Kepemimpinan Bapak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho baik, mereka dekat dengan masyarakat, mudah masyarakat berinteraksi kepada beliau. Sayangnya kepemimpinan Bapak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho terlalu singkat sehingga tidak bisa menilai keberhasilan secara utuh

Tanya : Apakah Bapak tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Saya tahu profil bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi bisa diakses dimana saja.

Tanya : Menurut Bapak apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.

Jawab : Siapapun bisa menjadi Gubernur asal memenuhi syarat baik militer maupun sipil. Bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi sangat layak dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada pilgubsu 2018 nanti karena beliau memiliki latar belakang kepemimpinan yang kuat.

Tanya : Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Jawab : Sehat dan Kekar.

Tanya : Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Gaya Komunikasi Pak Edi Rahmayadi Lugas dan tegas.

Tanya : Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Saya tidak mengenal keluarga beliau

4.1.1.4 Narasumber DR. Faisar Ananda

a. Biodata Narasumber



1. Nama : DR. Faisar Ananda
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 22 Juli 1964
3. Agama : ISLAM
4. Alamat : Jl. Mandala No. 12 A
5. Pendidikan Terakhir : DOKTOR (S3)
6. Jabatan : Lektor Kepala
7. Unit Kerja : UIN Provinsi Sumatera Utara

Riwayat Pendidikan

NO	URAIAN	JURUSAN	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	DOKTOR	Kajian Islam	IAIN Jakarta	2002
2	Pasca Sarjana (S2)	Islamic Law	MC-Gill University – Canada	1995
3	Sarjana Teknik (S1)	Syariah	IAIN Sumatera Utara	1988
4	SMU	-	SMA N X Medan	1982

5	SMP	-	Josua Medan	1979
6	SD	-	Muhammadiyah Medan	1976

Riwayat Organisasi

NO	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara	Pengurus	
2	Muhammadiyah Sumatera Utara	-	-

b. Hasil wawancara

Tanya : Persepsi bapak tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru

Jawab : Militer di orde baru kembali ke masa lalu, sebagaimana Suharto, Suharto mengatur TNI atau TNI mengatur Suharto. Kembali kepada Pancasila ke 3, militer bukan menerap persatuan tetapi mereka mengutamakan kesatuan. Kepemimpinan Militer di zaman orde baru atau di masa pak Harto, tidak ada kepemimpinan yang otoriter itu berhasil, tapi kepemimpinan pak harto dirindukan masyarakat saat ini.

Tanya : Persepsi bapak tentang militer pada era reformasi

Jawab : Kepemimpinan militer pada era reformasi sudah bagus, contohnya kepemimpinan bapak Susilo Bambang Yudhoyono. TNI menjaga pertahanan, Polisi menjaga keamanan, Jabatan strategis seperti menteri di pegang oleh Sipil.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur sumut belatar belakang dari militer di era reformasi

Jawab : Biasa saja tidak yang istimewa kita sudah sama rasakan.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut dari sipil di era reformasi

Jawab : Kepemimpinan Bapak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho biasa-biasa saja tidak ada sesuatu yang istimewa dan rakyat Sumatera Utara sudah merasakan di pimpin oleh mereka, citra aparaturnya pemerintah juga kurang baik.

Tanya : Apakah Bapak tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Siapa yang tak kenal bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi apalagi saat ini.

Tanya : Menurut Bapak apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.

Jawab : Tidak ada masalah. Siapapun bisa menjadi Gubernur asal memenuhi syarat dan ketentuan. Ustad Bapak pun bisa menjadi Gubernur. Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi sangat layak dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada pilgubsu 2018 nanti.

Tanya : Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Jawab : Penampilan phisik T.Edi Rahmayadi sangar, ini menunjukan orang lain tidak bisa macam-macam terhadap beliau.

Tanya : Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Gaya komunikasi ala militer keras.

Tanya : Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Belum pernah kita dengar keluarga beliau bermasalah.

4.1.1.5 Narasumber Ade Sandrawati Purba, SH, MH

a. Biodata Narasumber



1. Nama : Ade Sandrawati Purba, SH, MH
2. Tempat/Tgl. Lahir : Solok/ 6 Oktober 1974
3. Agama : ISLAM
4. Alamat : Jl. Setia Budi Psr 2 Medan
5. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)

6. Jabatan : Direktur

7. Unit Kerja : PT. PIP

Riwayat Pendidikan

No	Uraian	Jurusan	Tempat	Tahun
1	SD	-	SDN. 064970	-
2	SMP	-	SMPN 21/23	-
3	SMA	IPA	SMAN 13	-
4	D3	EKONOMI	LP31	-
5	SARJANA	EKONOMI	Universitas Medan Area	-
6	MAGISTER	HUKUM	UMSU MEDAN	-
7	DOKTOR	-	UNISBA BANDUNG	-

Riwayat Organisasi

No	ORGANISASI	Jabatan	TAHUN
1	APPI SUMUT	Sekretaris	2004
2	KBPP POLRI MEDAN	Ketua	2004
3	FKPPI SUMUT	Wakil ketua	2017
4	LBH MHKI SUMUT	Dirut	2017
5	IWAPI SUMUT	Wakil ketua	2016
6	PERGERAKAN INDONESIA	Ketua	2015

Riwayat Pekerjaan

No	NAMA INSTANSI	JABATAN	TAHUN
1	PT. Bravo Security Indonesia	MANAGER	2002
2	PT. Asa Karya Multiguna	MANAGER	2003
3	PT. Asa Karya Perkasa	DIRUT	2004-Sekarang
4	PT. Pandu Indera Persada	KOMISARIS	2005-Sekarang
5	PT. Putra Indera Perkasa	DIRUT	2013-Sekarang
6	Kantor Hukum ASP & Rekan	ADVOKAD	2015-Sekarang

b. Hasil wawancara

Tanya : Persepsi ibu tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru

Jawab : Ketakutan mendengar kata militer/ABRI. Penculikan dan penembakan misterius. Pembangunan di zaman pak Suharto luar biasa dengan Repelitanya. Kepastian ketersediaan bahan pokok.

Tanya : Persepsi ibu tentang militer pada era reformasi

Jawab : Demokrasi, berjuang untuk memperbaiki penataan yang lebih baik. System tata kelola Negara lebih baik. Pencegahan korupsi, pemilihan kepala daerah lebih baik. Membangun prekonomian lebih baik. Sumber daya alam harus dikelola Negara. Mengembalikan peran TNI sebagai pertahanan dan keamanan. Bapak Susilo Bambang Yudhono sudah membuktikan sebagai pemimpin berlatar belakang militer tetapi gaya kepemimpinannya sangat sipil. Gaya beliau yang berwibawa, fisik yang baik sehingga pantas memimpin Indonesia selama 2 periode.

Tanya : Persepsi ibu tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang dari militer di era reformasi.

Jawab : Pak (alm) T.Rizal Nurdin sosok yang bersahaja walaupun berlatar belakang militer. Tak banyak yang beliau perbuat untuk Sumatera Utara karena beliau memimpin di awal reformasi yang sedang mengalami masa transisi.

Tanya : Persepsi ibu tentang kepemimpinan Gubernur Sumut dari sipil di era reformasi

Jawab : Kepemimpinan pak Syamsul Arifin dan pak Gatot Pujonugroho sangat singkat jadi kepemimpinan belum dapat terukur. Pak Syamsul Arifin ramah, dekat dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pak Gatot Pujonugroho baik dan sangat rendah hati.

Tanya : Apakah ibu tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara dari TNI

Jawab : Saya mengenal bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi, beliau orang baik.

Tanya : Menurut ibu apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.

Jawab : Boleh saja Bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada pilgubsu 2018 nanti. Kendala beliau bagaimana bersikap mengenai birokrasi, penggunaan anggaran dan merekatkan semua elemen masyarakat Sumatera Utara.

Tanya : Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Jawab : Nampak kuat dan berwibawa.

Tanya : Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Tegas, lugas dan disiplin. Karena saya juga didik dari keluarga Polri jadi tidak jauh beda.

Tanya : Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Saya kurang mengenal keluarga beliau.

4.1.1.6 Narasumber Erwinsyah Hasibuan, M.Si

a. Biodata Narasumber



1. Nama : **Erwinsyah Hasibuan, M.Si**
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sei Silau/ 21 April 1979
3. Agama : ISLAM
4. Alamat : Jl. Karya Amal No. 33 C3 Medan
5. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)
6. Jabatan : Dosen
7. Unit Kerja : Universitas Panca Budi

Riwayat Pendidikan Umum

No	Uraian	Jurusan	Tempat	Tahun
1	SD	-	SDN. 010105 Asahan	1991
2	SMP	-	MTs Islamiyah Asahan	1994
3	SMA	-	MAN 1 Medan	1997
4	S1	T. Elektro	USU	2005-
5	Magister	Fisika	USU	2012-

Riwayat Organisasi

No	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	BKPRMI Medan	Sekretaris	2011-2015
2	KNPI Medan	Sekretaris	2013-2016
3	Karang Taruna Medan	Wakil Ketua	2017-2022
4	BKPRMI Medan	Ketua Umum	2015-2019

b. Hasil wawancara

Tanya : Persepsi bapak tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru

Jawab : Militer di orde baru bagaimana pertahanan dan keamanan menjadi prioritas walaupun militer menjadi alat untuk mengamankan kekuasaan. Kepemimpinan Militer di zaman orde baru atau di masa pak Suharto, bagaimana para perwira tinggi dapat memimpin Gubernur dan walikota/bupati. Militer yang didik sebagai pemimpin di kesatuannya. Pendidikan kepemimpinan sudah paripurna sehingga ketika menjadi kepala daerah para perwira tinggi tersebut tidak merasa canggung. Kepala Negara/Presiden yang juga berlatar belakang militer mudah mengatur dan berkoordinasi. Sehingga

Repelita bisa berjalan dengan baik. Karena sifat prajurit ini satu komando, walaupun ada istilah asal bapak senang.

Tanya : Persepsi bapak tentang militer pada era reformasi

Jawab : Kepemimpinan militer pada era reformasi sudah bagus, contohnya kepemimpinan bapak Susilo Bambang Yudhoyono. TNI menjaga pertahanan, Polisi menjaga keamanan, Jabatan strategis seperti menteri di pegang oleh Sipil. Masyarakat Indonesia senang dengan kepemimpinan bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan terbukti beliau terpilih 2 periode menjadi presiden Republik Indonesia.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang dari militer di era reformasi

Jawab : Biasa saja tidak karena beliau (alm) T.Rizal Nurdin dipilih melalui mekanisme paripurna di DPRD Sumatera Utara jadi kedekatan beliau ke anggota DPRD Sumatera Utara sangat dekat. Beliau memimpin di awal reformasi sehingga konsentrasi hampir seluruh kepala daerah stabilitas keamanan dan partisipasi krisis ekonomi.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang dari sipil di era reformasi

Jawab : Kepemimpinan Bapak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho biasa-biasa saja tidak ada sesuatu yang istimewa dan rakyat Sumatera Utara sudah merasakan di pimpin oleh mereka, stabilitas keamanan

kurang baik, citra aparaturn pemerintah juga kurang baik. Kepemimpinan pak Syamsul Arifin sektor kesehatan mulai diperhatikan dan kepemimpinan pak Gatot Pujonugroho jalan-jalan propinsi mulai baik sekitar 80%. Tetapi dimasa Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho tidak sampai 1 periode kepemimpinan sehingga agak kesulitan kita menilainya.

Tanya : Apakah Bapak tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Sangat mengenal bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi.

Tanya : Menurut Bapak apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.

Jawab : Sangat layak Bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada pilgubsu 2018 nanti. Beliau sangat mengenal wilayah Sumatera Utara dan pernah menjadi Pangkostrad Bukit Barisan sehingga kemampuan beliau tidak perlu diragukan lagi. Pendidikan kepemimpinan di kesatuan beliau sudah sempurna.

Tanya : Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Jawab : Kuat dan kekar seperti militer biasanya.

Tanya : Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Gaya komunikasi beliau tegas dan berwibawa

Tanya : Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Keluarga beliau kurang tereksposes

4.1.1.7 Narasumber Drs. H. Abdillah, SE, Ak, MBA

a. Biodata Narasumber



1. Nama : Drs. H. Abdillah, SE, Ak, MBA
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, Sumatera Utara, 19 Mei 1955
3. Agama : ISLAM
4. Alamat : Jl. Perak No. 10 A/B Medan
5. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)
6. Jabatan : Pengusaha
7. Unit Kerja : Pengusaha

Masa kepemimpinannya ditandai dengan berbagai macam proyek penataan dan pembangunan kota, terutama proyek papan iklan dan proyek lampu hias

kota yang dinilai kontroversial. Selain itu, ia juga menyetujui pembangunan berbagai pusat perbelanjaan modern dan pusat jajan Kesawan Square, sebuah pusat jajan di tengah kota yang dinilai cukup berhasil. Di samping itu, kebijakannya mengkomersilkan sebagian dari Lapangan Merdeka Medan untuk dibangun tempat 'nongkrong', Merdeka Walk juga menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Tetapi, kebijakannya tersebut di kemudian hari mendapat acungan jempol, karena hal itu ternyata menghidupkan geliat kota di malam hari.

b. Hasil wawancara

Tanya : Persepsi bapak tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru

Jawab : Anggota militer telah di siapkan menjadi pemimpin sejak pangkat terendah sampai tertinggi, pendidik kepemimpinan ala militer. TNI juga sangat menguasai teritorial. Pak Suharto yang berlatar belakang militer pada saat menjabat sebagai presiden RI selalu berimprovisasi dengan sipil dalam hal menjalankan pemerintahannya. Para pakar ekonomi, pendidikan, pertanian masuk dalam jajaran menterinya. Memang kegiatan social kemasyarakatan, aktivis-aktivis mahasiswa dan politik cukup diawasi. Tetapi pertahanan dan keamanan sangat menonjol karena memang tugas militer yang seperti itu.

Tanya : Persepsi bapak tentang militer pada era reformasi

Jawab : Masa reformasi ini berjuang untuk demokrasi. Masa reformasi yang digalang tokoh-tokoh bersama mahasiswa. Konsep reformasi pada

saat itu belum ada. Memperjuangkan reformasi lebih mudah, yang sulit adalah mengisi reformasi. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi, yang penting adalah pencegahan korupsi. Anggota TNI sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin, untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi anggota TNI harus mengikuti pendidikan, semua yang pendidikan yang diajarkan sebahagian besar adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan TNI di masa reformasi baik karena TNI dapat berkolaborasi dengan era reformasi.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur sumut berlatar belakang TNI di era reformasi

Jawab : Gubernur T. Rizal Nurdin seorang Jenderal yang sangat sipil. Pola kepemimpinan beliau perlu di contoh, kalau bisa para calon Gubernur Sumatera Utara mencontoh pola kepemimpinan beliau. Pada zaman reformasi dia buka kran semua, kita tidak pernah sulit menghadapinya dan sangat ramah tidak nampak seorang jenderal. Beliau sangat nasionalis mengangkat para pejabat dari beragam suku yang ada di Sumatera Utara. Jika ada penilaian terhadap beliau maka abang memberi penilaian sangat baik. Beliau juga menjadi panutan abang. Begitu beliau sudah tiada, semangat kita di Medan agak drop.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur sumut berlatar belakang dari sipil di era reformasi

Jawab : Kepemimpinan Bapak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho bagus. Kedekatan kemasyarakat Pak Syamsul sangat cair. Pak Gatot baik, cuma kita melihat hasil kerja pada gatot karena kepemimpinan beliau sangat singkat begitu juga dengan pak Syamsul Arifin.

Tanya : Apakah Bapak tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Abang mengenal bapak Letjen (Purn) T. Edy Rahmayadi .

Tanya : Menurut Bapak apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.

Jawab : Sangat pantas, karena beliau didukung 6 partai besar. Partai yang mendukung beliau sudah pasti berpikir dan menimbang dengan proses penjaringan itu panjang dan ketat untuk mengusung beliau menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Dengan kajian itu beliau sangat layak di pilih.

Tanya : Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Jawab : Sebagai parajurit militer, penampilan fisik jelas terjaga, apalagi beliau pimpinan tinggi sebuah institusi militer, penampilan fisik prima.

Tanya : Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Gaya komunikasi para petinggi militer ini tegas, lugas dan berwawasan NKRI.

Tanya : Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Saya berkeyakinan keluarga beliau baik, karena anggota militer ketika mau membangun rumah tangga sudah melalui serangkaian test dan wawancara.

4.1.1.8 Narasumber H. Ikrimah Hamidy, ST, MSi

a. Biodata Narasumber



1. Nama : **H. Ikrimah Hamidy, ST, MSi**
2. Tempat/Tgl. Lahir : Kota Nopan, 29 Maret 1975
3. Agama : ISLAM
4. Alamat : Jl. Budi Luhur No.5 C Medan
5. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)
6. Jabatan : Anggota DPRD

7. Unit Kerja : DPRD Sumatera Utara

Riwayat Organisasi

No	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	KAMMI SUMUT	Ketua	1998-2000
2	PKS MEDAN	Ketua	2001-2006
3	KEADILAN	Ketua	2008-2015

Riwayat Pekerjaan

No	NAMA INSTANSI	JABATAN	TAHUN
1	DPRD TK II MEDAN	Ketua F-PKS	2004-2009
2	DPRD TK II MEDAN	Wakil Ketua	2009-2014
3	DPRD TK I SUMUT	Anggota	2014-2019
4	DOSEN LP3I	-	2001-2003
5	DOSEN UNPRI	-	2013-Sekarang

b. Hasil wawancara

Tanya : Persepsi bapak tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru

Jawab : Masa orde baru ada fraksi TNI/Polri dan para petinggi TNI banyak yang menjadi kepala daerah. Sosok TNI ketika menjadi kepala daerah mereka menjadi sosok yang paling fleksibel. Bahan pokok mudah di dapatkan dan murah. Gaya kepemimpinan bapak Suharto yang mewujudkan stabilitas ekonomi.

Tanya : Persepsi bapak tentang militer pada era reformasi

Jawab : Sesuai dengan tuntunan Reformasi ada keadilan dan tidak ada pengkhususan terhadap TNI. Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi TNI di orde baru. Sosok TNI Keras, disiplin dan tidak neko-neko. Banyak pimpinan berlatar belakang dari TNI di era

reformasi seperti SBY dan Gubernur Bali tetapi mereka fleksibel dan sangat sipil. Malahan kita lihat orang-orang yang sosok tegas malahan akomodatif, relatif dan meminimalisasi konflik yang diutamakan. Rakyat rindu pada masa pak Harto apalagi berhubungan dengan tekanan ekonomi pada saat ini. Muncullah sosok alternatif berlatar belakang militer menjadi kepada daerah.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang TNI di era reformasi

Jawab : Dimasa Gubernur (alm) T. Rizal Nurdin sangat dekat dengan DPRD. Pada saat itu KPK belum terlalu kuat sehingga kita belum bisa mengatakan beliau bersih apa tidak. Kepemimpinan beliau biasa saja. Masa kepemimpinan beliau taring DPRD sangat kuat karena beliau di pilih melalui rapat DPRD. Jaksa dan kepolisian di awal orde reformasi kurang kuat. Masalah yang di alami di kepemimpinan pak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho dimasa Gubernur sebelum hal yang bisa karena perangkat-perangkat KPK belum lengkap dan kuat.

Tanya : Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang sipil di era reformasi

Jawab : Dimasa Kepemimpinan Bapak Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho KPK sudah sangat kuat berbeda dengan masa (alm) Gubernur T. Rizal Nurdin sehingga bapak kepala daerah tersandung

kasus korupsi berbeda dengan dimasa awal reformasi. Pak Syamsul Arifin kasusnya mobil dinas di Langkat. Perbedaan kepemimpinan Pak (Alm) T. Rizal Nurdin, Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho dipengaruhi peraturan-peraturan yang berbeda pada masa itu. Apalagi keluarnya peraturan yang mengatakan DPRD tidak bisa memecat kepala daerah.

Tanya : Apakah Bapak tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Saya tahu profil beliau bagaimana dan beberapa kali saya membuat kegiatan .

Tanya : Menurut Bapak apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.

Jawab : Kalau kita lihat dari latar belakang pendidikannya terbiasa menjadi pemimpin, masuk ke militer juga menjadi komandan/pemimpin dan masuk ke organisasi juga menjadi pemimpin. Jadi dari segi pengalaman sudah mumpuni. Tapi ada perbedaan memimpin militer dan sipil. Memimpin militer itu gampang satu komando/hirarki, A diatas A juga di bawah. Ketika sistem komando di terapkan perlu ada pendekatan yang luar biasa. Karena kepemimpinan komanda atasannya jelas sementara di kepemimpinan sipil banyak kepentingan elemen-elemen di sekeliling beliau yang akan mempengaruhi bagaimana keputusan yang akan di buat. Sosok Edy

Rahmayadi saat ini sudah banyak dipengaruhi sipil yang akan menarik dan mengelilingi beliau. Dan yang menjadi T.Edy Rahmayadi sangat layak dipilih beliau ada di lintas partai sehingga kepentingan partai tertentu bisa di minimalisir. Kekurangan beliau karena bukan dari anggota parpol, beliau jadi kurang memahami suasana kebhathinan parpol dan berinteraksi dengan orang-orang parpol.

Tanya : Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

Jawab : Kita sama-sama mengetahui penampilan fisik Pak Edi Rahmayadi, kekar, sehat, rapi dan berwibawa.

Tanya : Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Tegas, berwibawa dan meyakinkan.

Tanya : Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Jawab : Keluarga beliau baik, anak-anaknya tidak pernah kita dengar bermasalah.

Wawancara berhenti setelah narasumber kedelapan memaparkan persepsinya terhadap calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 karena hasil wawancara

tentang Persepsi tokoh masyarakat kota Medan terhadap calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 kepada narasumber pertama sampai kedelapan persepsinya hampir sama atau mendekati.

4.1.2 Waktu, tempat dan lama wawancara narasumber

4.1.2.1 Narasumber pertama Prof. Hj. Lusiana Adriani Lubis, MA.,Ph.D

Wawancara dilaksanakan pada : Senin, 5 maret 2018 di ruangan ketua prodi Mikom Universitas Sumatera Utara, lama wawancara 15 menit.

4.1.2.2 Narasumber kedua Drs Shohibul Anshor Siregar Msi

Wawancara dilaksanakan pada : Rabu, 7 maret 2018 di gedung DPRD Sumatera Utara ruangan Fraksi Partai Amanat Nasional, lama wawancara 60 menit.

4.1.2.3 Narasumber ketiga H. ZULHAM EFENDI SIREGAR, ST

Wawancara dilaksanakan pada : Kamis, 8 maret 2018 di gedung Dispora Propinsi Sumatera Utara, lama wawancara 30 menit.

4.1.2.4 Narasumber keempat DR. Faisar Ananda

Wawancara dilaksanakan pada : Minggu, 10 Maret 2018 di kafe Asia Jl. Halat, lama wawancara 15 Menit.

4.1.2.5 Narasumber kelima Ade Sandrawati Purba, SH, MH

Wawancara dilaksanakan pada : Jum'at, 16 Maret 2018 di MAN 1 Medan Jl. Pancing Medan, lama wawancara 25 Menit.

4.1.2.6 Narasumber keenam Erwinsyah Hasibuan, M.Si

Wawancara dilaksanakan pada : Selasa, 20 Maret 2018 di Restoran Koki Sunda, lama wawancara 45 Menit.

4.1.2.7 Narasumber ketujuh Drs. H. Abdillah, SE, Ak, MBA

Wawancara dilaksanakan pada : Rabu, 21 Maret 2018 di rumah pribadi narasumber Jl. Perak no.10 A/B Medan, lama wawancara 55 menit.

4.1.2.8 Narasumber kedelapan H. Ikrimah Hamidy, ST, MSi

Wawancara dilaksanakan pada : Rabu, 28 Maret 2018 di gedung DPRD Sumatera Utara di ruangan komisi A, lama wawancara 40 menit.

4.2. Pembahasan

a. Pertanyaan Pertama

Persepsi bapak/ibu tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru

Kepemimpinan bapak Jend. H.M. Soeharto di orde baru baik, pembangunan terencana 5 tahun, pertahanan dan keamanan, bahan pokok terjamin, kolaborasi militer dan sipil di cabinet, kekurangan hanya kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM di daerah konflik.

b. Pertanyaan Kedua

Persepsi bapak/ibu tentang militer pada era reformasi

Sesuai dengan tuntutan reformasi, tokoh-tokoh militer dapat menyesuaikan diri dan menjadi sangat sipil, misalnya : Bapak Jenderal Wiranto, Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Malahan bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer menjadi Presiden ke 6 selama 2 periode 2004 – 2014.

c. Pertanyaan Ketiga

Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang TNI di era reformasi

Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin memimpin Sumatera Utara periode 1998, beliau jembatan antara orde baru dan era reformasi. Kepemimpinan beliau dilalui dengan konsolidasi dan konsolidasi dengan

pemerintah pusat karena saat itu Indonesia dalam keadaan krisis multi dimensi sehingga tidak bisa diukur keberhasilannya.

d. Pertanyaan Keempat

Persepsi bapak tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang dari sipil di era reformasi

Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari sipil di era reformasi adalah Bapak H Syamsul Arifin, SE dan Bapak H. Gatot Pujonugroho ST, M.Si terlalu singkat belum selesai satu periode sudah bermasalah dengan permasalahan hukum. H Syamsul Arifin, SE dekat dengan masyarakat Sumatera Utara karena jargon beliau sahabat semua suku dan Bapak H. Gatot Pujonugroho ST rendah hati.

e. Pertanyaan Kelima

Apakah Bapak/Ibu tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Semua narasumber mengenal profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI, karena sosok Letnan Jenderal (Purn) TNI Edy Rahmayadi bukan asing bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya kota Medan, beliau pernah sekolah di SMA Negeri 1 Medan dan menjadi Panglima Kodam I/Bukit Barisan.

f. Pertanyaan Keenam

Menurut Bapak/Ibu apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih

Bapak Letnan Jenderal (Purn) TNI Edy Rahmayadi layak di pilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 – 2023. Beliau sudah memenuhi syarat administrasi sebagai calon Gubernur karena sudah mengundurkan diri dari TNI. Pengalaman beliau memimpin di kesatuan juga menjadi jaminan beliau memimpin propinsi yang berpenduduk lebih kurang 13 juta jiwa. Apalagi beliau pernah menjabat Panglima Kodam I/Bukit Barisan sehingga penguasaan wilayah Sumatera Utara tidak perlu diragukan lagi. Sebagai prajurit TNI beliau tegas dan berwibawa yang sudah dinantikan kepemimpinan di Sumatera Utara.

g. Pertanyaan Ketujuh

Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Karena beliau seorang tentara/abadi Negara, pastinya keseharian menunjukkan wibawanya. Karena keamanan Negara berada di pundaknya. Jika mereka para tentara tidak berwibawa maka musuh Negara akan meremehkannya. Penampilan fisik Edi Rahmayadi terjaga, selaku petinggi di militer beliau dituntut senantiasa menunjukkan kebugaran phsisknya.

h. Pertanyaan Kedelapan

Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Sikapnya Tegas karena beliau adalah jenderal bintang 3 yang menjadi panglima komando strategi angkatan darat (Pangkostrad), ketegasan beliau

terhadap dan cara berkomunikasi sangat cocok untuk masyarakat sumatera utara yang heterogen suku, budaya dan agama. Cara komunikasi yang tegas tersebut memudahkan beliau berinteraksi dengan masyarakat sumatera utara yang heterogen. Apalagi masyarakat sudah muak dengan janji-janji manis dari para calon berlatar belakang sipil.

i. Pertanyaan Kesembilan

Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI

Keluarga beliau tinggal di Medan, anak-anaknya pun mengambil pendidikan di Medan, sehingga kedekatan beliau dengan masyarakat baik kebiasaan dan adat istiadat setempat keluarga beliau sudah paham. Hal ini memudahkan beliau ketika memimpin sumatera utara karena sudah memahami karakter masyarakat sumatera utara. Istri beliau ada putri asli Sumatera Utara bermarga Lubis, anak beliau sekolah di SMA Negeri 1 Medan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini menunjukkan cinta dan seriusnya beliau untuk membangun sumatera utara menuju yang bermartabat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian Persepsi tokoh masyarakat kota Medan tentang calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI pada pilkada Gubernur Sumatera Utara 2018 di paparkan sebagai berikut :

1. Gaya Komunikasi Politik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI pada pilkada Gubernur Sumatera Utara 2018, komunikasi verbal dan nonverbal.
 - a. Letnan Jenderal (Purn) T. Edy Rahmayadi bukan sosok yang asing bagi warga Sumatera Utara karena beliau pernah sekolah di SMA Negeri 1 Medan, pernah menjabat Panglima Kodam I Bukit Baris dan keluarga beliau juga berdomisili di kota Medan propinsi Sumatera Utara
 - b. Letnan Jenderal (Purn) T. Edy Rahmayadi rela menanggalkan pangkat dan jabatannya dan kembali untuk daerahnya, hanya karena prihatin dengan kondisi Sumut yang martabatnya mulai tergerus.
 - c. Letnan Jenderal (Purn) T. Edy Rahmayadi semasa SMA dikenal aktif menekuni olahraga sepakbola. Edy juga mudah bergaul sehingga disenangi teman-teman di sekolahnya.
2. Komunikasi efektif
 - a. Pencitraan baik TNI sejak masa orde baru dan era reformasi serta kerinduan masyarakat terhadap sosok yang tegas dan berwibawa

membuat Letnan Jenderal (Purn) T. Edy Rahmayadi sangat layak di pilih masyarakat Sumatera Utara pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

- b. Letnan Jenderal (Purn) T. Edy Rahmayadi merupakan prajurit TNI yang mempunyai pengalaman memimpin di kesatuannya, sehingga gaya komunikasi yang tegas, otoriter dan satu komando saat ini dibutuhkan masyarakat sumatera utara.
3. Persepsi tokoh masyarakat kota Medan
 - a. Kepemimpinan berlatar belakang TNI pada orde baru dibawah kepemimpinan bapak H.Suharto menciptakan stabilitas nasional, ketersediaan bahan pokok dan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan walaupun kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan aktivitas politik di batasi.
 - b. Kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin walaupun tidak terlalu baik tapi beliau mampu mengendalikan stabilitas keamanan propinsi Sumatera Utara pada awal reformasi memasuki pase transisi orde baru ke era reformasi dan mengalami krisis moneter yang berkepanjangan. Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin jembatan orde baru ke eras reformasi.
 - c. Kepemimpinan bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang dari TNI selama 2 periode dianggap berhasil menaikkan citra baik para petinggi TNI yang ingin maju menjadi Kepala Daerah maupun

Kepala Negara. Kepemimpinan bapak Susilo Bambang Yudhoyono berlatar belakang dari TNI selama 2 periode lebih mengkedepankan dialog di bandingkan kekuatan militer. Di zaman Kepemimpinan bapak Susilo Bambang Yudhoyono berlatar belakang dari TNI selama 2 periode demokrasi berjalan baik, para aktivis bebas menyampaikan pendapat di depan publik. Kolaborasi antara Sipil dan berlatar belakang militer di pemerintah baik.

- d. Gubernur Sumatera Utara dari Sipil yaitu Bapak H. Syamsul Arifin, SE dan Bapak H. Gatot Pujonugroho, ST, M.Si yang tersangkut kasus korupsi dan diberhentikan sekaligus diganti. Sehingga menciptakan pencitraan buruk bagi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang sipil dan menaikkan pencitraan calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI.

5.2. Saran

1. Perlulah disosialisasikan dari para calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI, Tim Sukses dan Partai Politik pendukung mengenai profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 di kabupaten/kota se propinsi Sumatera Utara.
2. Perlu ada pencitraan baik lainnya di luar pencitraan berlatar belakang TNI bagi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI sehingga masyarakat Sumatera Utara dapat menimbang sisi yang lain tersebut.

3. Perlu pembuktian yang baik dari sosok calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang TNI sehingga masyarakat tidak apatis dengan calon yang ada, berdampak dengan tingginya golput.
4. Penelitian ini belum sempurna sehingga diharapkan ada penelitian dengan tidak membatasi dari tokoh masyarakat kota Medan saja tetapi tokoh masyarakat Sumatera Utara.
5. Penelitian ini juga bisa menjadi salah satu sumber pustaka untuk menambah literasi dalam penulisan karya ilmiah.
6. Kedepannya penelitian ini dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif bisa dikombinasikan dengan metode penelitian kuantitatif sehingga hasil penelitian ini jauh lebih sempurna.

Daftar Pustaka

- Afib, Rizal. *Gaya Komunikasi Politik Pimpinan Dprd Provinsi Jawa Tengah Pada Saat Reses Tahun 2010*. (2011). Masters thesis, Master Program in Communication Science, Universitas Diponegoro
- Astuti, B. (2005). *Kematangan Emosi Anak Kelas 6 Sekolah Dasar Ditinjau dari Persepsi Kedemokratisan Pola Asuh Ayah dan Ibu*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Azhari, Aidul Fitriadi. (2003). *Dari Catatan Wiranto Jendral Purnawirwan: Bersaksi di Tengah Badai*. Jakarta: IDE Indonesia.
- Azwar, Rully Chairul. (2009). *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era*. Jakarta: Grasindo.
- Boyatzis, Richard, E. 1998. *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. Thousand Oaks: Sage pub.
- Budiardjo Miriam Prof. (1982). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta PT Gramedia
- Bungin, Burhan H.M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Prenada Media.
- Chrisnandi, Yuddy. 2005, *Reformasi TNI: Persektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. LP3ES. Jakarta..
- Chairunnisa, Ninis. (2017). *Pilkada 2018, Lima Jenderal Siap Maju Jadi Calon Gubernur*. Di akses pada 9 Januari 2018 dari <https://fokus.tempo.co/read/1045219/pilkada-2018-lima-jenderal-siap-maju-jadi-calon-Gubernur>.
- Dalimunthe, Ihsan. (2017). *H-30 Pemilu, SK Pemberhentian Petinggi Polisi Atau Militer Peserta Pilkada Harus Keluar*. Di akses pada 9 Januari 2018 dari <http://politik.rmol.co/read/2017/12/26/319804/H-30-Pemilu>.

- Desiderato, O, D.B. Howieson dan Jackson, J.H. (1976). *Investigating Behavior: Principles of Psychology*. Newyork: Harper and Row Publisher.
- Dimedan.co. (2016). *Ini Dia Fakta Unik Dan Menarik Kota Medan*. Diakses pada 9 Januari 2018 dari <https://www.dimedan.co/medan/fakta-unik-dan-menarik-kota-medan/>.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Elhaq, Imam Habibi dan Satria, Arif. (2011). *Persepsi Pesanggem Mengenai Hutan Mangrove Dan Partisipasi Pesanggem Dalam Pengelolaan Tambak Mangrove Ramah Lingkungan Model Empang Parit*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia 5 (1).
- Hamid. Farid dan Budianto. Heri. (2011). *Ilmu Komunikasi*, Kencana : Jakarta.
- Hidayat, Qur'anul. (2018). *Menakar Peluang Calon dari Militer di Pilkada Serentak 2018*. Diakses pada 9 Januari 2018 dari <https://news.okezone.com/read/2018/01/09/337/1842304/menakar-peluang-calon-dari-militer-di-pilkada-serentak-2018>.
- Jalaluddin, Rakhmat. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- J. Supranto, 2000, *Statistik (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Keenam, Erlangga : Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring. *Petahana*. Diakses pada 6 Januari 2018 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petahana>.
- Kontras. (2008). *Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)*., hal. 3-5
- _____. 2004. *Bedil dan Kursi, Dimensi Politik Militer di Indonesia, Pensil 324*. Jakarta: Kontras.

- Landasanteori. (2015). *Penghapusan Dwi Fungsi ABRI Pasca Orde Baru*. (di akses pada 12 Januari 2018 dari www.landasanteori.com/2015/10/penghapusan-dwi-fungsi-abri-pasca-orde.html)
- Moleong, Lexy J, Dr. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1993. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Nimmo, Dan. (2005). *Komunikasi Politik*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Pelangi Aksara : Yogyakarta
- Prasetia, Andhika. (2018). *Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018*. Diakses pada 6 Januari 2018 dari <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>.
- Qadaruddin, Muhammad. (2016). *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rush dan Philip Altopff. (1998). *Pengantar Sosiologi Politik*. Raja Grafindo : Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- Suryowati, Estu. (2017). *Ini Catatan untuk KPU RI agar Pilkada Serentak 2018 Sukses*. Di akses pada 9 Januari 2018 dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/21255471/ini-catatan-untuk-kpu-ri-agar-pilkada-serentak-2018-sukses>.
- Teoripolitik (2011), *Perbandingan Partisipasi Politik Zaman Orde Baru dengan Era Reformasi* (diakses pada 06 Februari 2018 dari <https://sefasdesak.wordpress.com/2011/05/10/perbandingan-partisipasi-politik-zaman-orde-baru-dengan-era-reformasi/>)
- Tirto.id. (2018). *Edy Rahmayadi*. Di akses pada 9 Januari 2018 dari <https://tirto.id/m/edy-rahmayadi-Dc>.

Perloff. R.M., *Political Communication: Politics, Press, and Public in America*. (1998). Lawrence Erlbaum : New Jersey and London.

Wikipedia. *Petahana*. Diakses pada 6 Januari 2018 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Petahana>.

Wikipedia. *Persepsi*. Diakses pada 06 Februari 2018 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>.

_____. *Daftar tokoh Sumatera Utara*. Diakses pada 9 Januari 2018 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_tokoh_Sumatera_Utara.

Witjaksono, Aiman. (2018). *Drama dan Jenderal Aktif TNI AD dan Polri di Pilkada 2018*. Di akses pada 9 Januari 2018 dari <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/08/06070091/drama-dan-jenderal-aktif-tni-ad-dan-polri-di-pilkada-2018->.

Yuddy Chrisnandi. 2005. *Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Yuniati, Yenni. (2002). *Pengaruh Berita di Surat Kabar Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Politik*. Jurnal Mediator 3 (1).

Lampiran : Transkrip wawancara

1. Persepsi Bapak/Ibu tentang militer dan kepemimpinannya di orde baru
2. Persepsi Bapak/Ibu tentang militer pada era reformasi
3. Persepsi Bapak/Ibu tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang TNI di era reformasi
4. Persepsi Bapak/Ibu tentang kepemimpinan Gubernur Sumut berlatar belakang dari sipil di era reformasi
5. Apakah Bapak/Ibu tahu profil calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI
6. Menurut Bapak/Ibu apakah calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI layak di pilih.
7. Bagaimana penampilan fisik calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI
8. Bagaimana gaya komunikasi calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI
9. Bagaimana keluarga calon Gubernur Sumatera Utara berlatar belakang dari TNI